



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
2021**

Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Kode Pos 52312 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0284) 321029 Faks (0284) 321287
Email : bpkadkabpemalang@gmail.com



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun

2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2022.
2. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
 - b. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang
 - d. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
 - e. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
 - f. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
 - g. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Pemalang
 - h. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - i. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

- Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang
- j. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
 - k. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
 - l. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
 - m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
 - n. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang
 - o. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
 - p. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
 - q. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
 - r. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
 - s. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
 - t. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang
 - u. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
 - v. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
 - w. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
 - x. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
 - y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
 - z. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang
 - aa. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Pemalang
 - bb. Rencana Kerja Kecamatan Pemalang
 - cc. Rencana Kerja Kecamatan Taman
 - dd. Rencana Kerja Kecamatan Petarukan
 - ee. Rencana Kerja Kecamatan Comal
 - ff. Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading
 - gg. Rencana Kerja Kecamatan Bodeh
 - hh. Rencana Kerja Kecamatan Ulujami
 - ii. Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang
 - jj. Rencana Kerja Kecamatan Randudongkal
 - kk. Rencana Kerja Kecamatan Warungpring
 - ll. Rencana Kerja Kecamatan Moga
 - mm. Rencana Kerja Kecamatan Pulosari
 - nn. Rencana Kerja Kecamatan Belik
 - oo. Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap

Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap

Ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 30





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050/ 398 / TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, menyebutkan bahwa Perangkat daerah Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sebagai Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tat Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019 (Covid19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);
 33. Peraturan Bupati Pematang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022.
 34. Peraturan Bupati Pematang Nomor 30 tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pematang Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pematang Tahun 2022 selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 serta sebagai acuan dalam penentuan target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 5 Juli 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Drs. M.A. PUNTODEWO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19640327 199201 1 002

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan pada BPKAD Tahun anggaran 2022 yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Renja BPKAD Tahun 2022 dirancang berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang dalam upaya pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan.

Renja Tahun 2022 tidak bergeser dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BPKAD 2021 -2026. Peningkatan Pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kemudahan akses data menjadi tujuan BPKAD dengan sasaran peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Renja dimaksudkan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 dan tidak terlepas dari pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya. Pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Pemalang. BPKAD merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai posisi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, mendukung misi Kabupaten Pemalang yang ke-2 yaitu mewujudkan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Renja sebagai salah satu dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan yang telah melalui tahap evaluasi dan merupakan turunan dari Renstra BPKAD 2021-2025. Renja BPKAD Tahun 2022 merupakan dasar untuk menyusun rencana kerja anggaran (RKA) BPKAD Tahun 2022 yang selanjutnya akan disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Tahun Anggaran 2022 yang tetap berpedoman pada RKPD Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

Pemalang, 5 Juli 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Drs. M. A. PUNTODEWO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19640327 199201 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022	ii
KEPUTUSAN KEPALA BPKAD NOMOR 050/398 / TAHUN 2021 TENTANG RENJA BPKAD TAHUN 2022	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKAD	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kab.Pemalang...	25
2.3 Hasil Evaluasi SAKIP pada BPKAD Tahun 2020.....	36
2.4 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD	36
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	48
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	64
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD	78
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	78
3.1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Kementerian Keuangan.....	78
3.1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi	82
3.1.3 Telaah Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang	86
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD	88
3.2.1 Tujuan BPKAD	88
3.2.2 Sasaran BPKAD.....	88
3.3 Program dan Kegiatan	90
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD	102
BAB IV PENUTUP	122

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Penjelasan Realisasi Kegiatan di Bawah 85 %	15
Tabel 2.2 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD sampai dengan Tahun 2021	20
Tabel 2.3 : Target dan Realisasi Indikator Hasil Opini BPK atas LKD	29
Tabel 2.4 : Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Pematang Jaya	33
Tabel 2.5 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya	49
Tabel 2.6 : Pokok-Pokok Pikiran dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022	65
Tabel 3.1 : Tabel Rumusan Rencana program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Rencana 2023	91
Tabel 4.1 : Rencana Kerja dan Pendanaan BPKAD Kab.Pematang Jaya	103

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah Dokumen perencanaan tahunan BPKAD yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pada Tahun Anggaran 2022 untuk mencapai sasaran pembangunan, dengan tetap berpedoman pada Renstra BPKAD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2022. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang yang terjabarkan dalam program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang mempedomani arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang;
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke dalam KUA dan PPAS serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKAD Tahun 2022;
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan sejauh mana capaian kinerja yang telah tercapai pada tahun tersebut serta mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mendesak dan krusial pemerintah Kabupaten Pemalang pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang harus dipenuhi BPKAD Tahun 2022.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Perangkat Daerah tidak terlalu menggambarkan besaran anggaran yang terfokus pada pencegahan penyebaran Covid-19, karena muara anggaran dalam rangka penanggulangan bencana pandemi Covid-19 ditampung pada Belanja Tidak Terduga yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah maka refocusing anggaran di Kabupaten Pematang Jaya selain bertujuan untuk mencegah penyebaran covid19 di Kabupaten Pematang Jaya juga untuk pemulihan ekonomi antara lain yaitu :

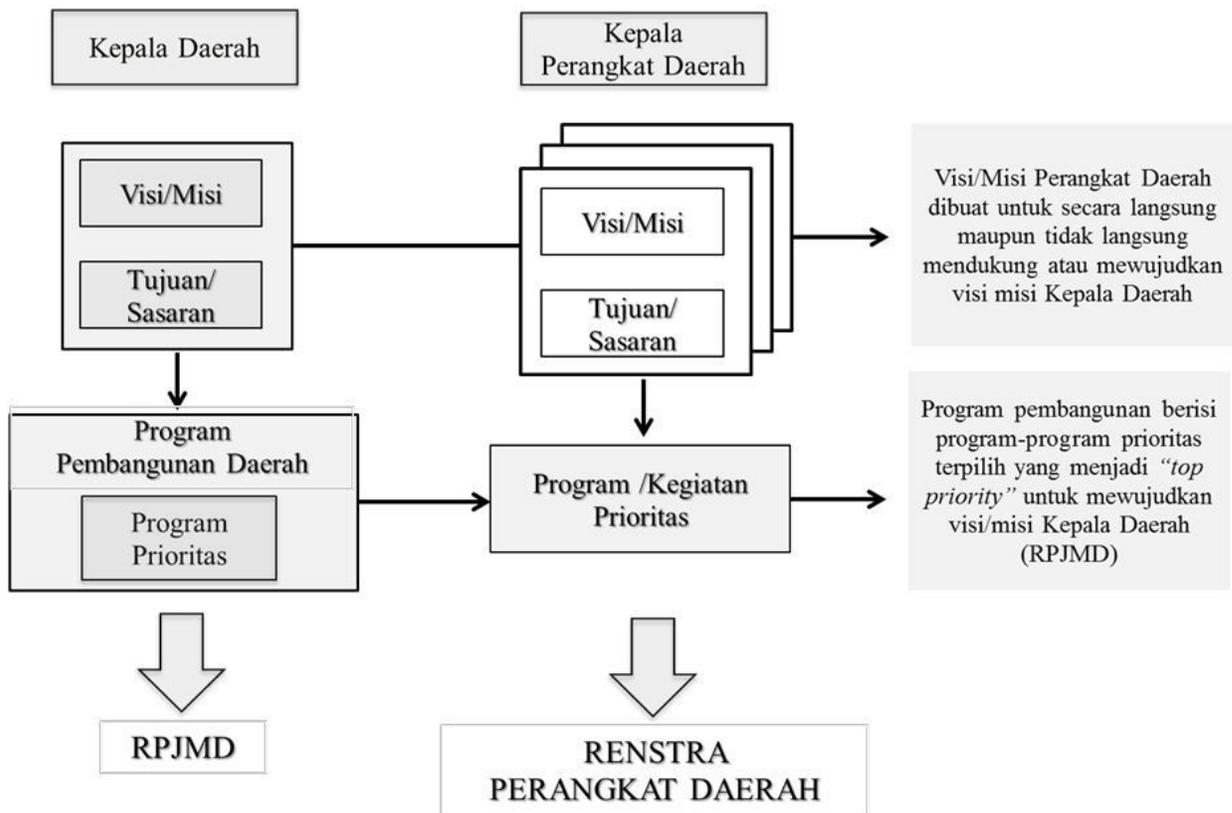
1. Memberikan stimulus kepada UMKM yang terdampak Covid-19 dengan cara pemberian bantuan berupa bahan baku ataupun Bantuan Langsung Tunai.
2. Memberikan bantuan sembako ataupun Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat yang pendapatannya terdampak pandemi Covid-19.
3. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pematang Jaya seperti penyediaan dana rapid tes, swab tes, masker, Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis.
4. Penyediaan dana operasional untuk pengamanan masyarakat pada saat pemberlakuan jam malam dan operasional pelayanan gugus tugas Covid-19.

Rencana Kerja 2022 masih dengan semangat efisiensi anggaran guna lebih memfokuskan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pematang Jaya beserta penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di masyarakat.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sumber Gambar : Permendagri No 86 Tahun 2017

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan nomenklatur yang disesuaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang terdapat 3 Program dengan 14 Kegiatan dan 83 Sub Kegiatan pada BPKAD Kabupaten Pemalang. Adapun hasil mapping program kegiatan dan sub kegiatan tersebut sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana pada

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

Dalam rangka memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah se-Kabupaten Pemalang terkait dengan pengelolaan keuangan, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selaku pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, BPKAD melaksanakan fungsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Adapun fungsi yang diselenggarakan BPKAD dalam melaksanakan tugas tersebut adalah :

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyusun Rencana Kerja BPKAD Tahun 2022, senantiasa diselaraskan dengan dokumen perencanaan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan Visi **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni** yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019 (Covid19);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);

33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 adalah :

- a) Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran sebelumnya,
- b) Mewujudkan Sinergitas Rencana kerja Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2022 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021 – 2026.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang terinci dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

- b. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program pada seluruh Bidang khususnya bagi pelaksana teknis Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja;
- d. Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya regulasi baru dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKAD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
- 2.3. Hasil Evaluasi SAKIP
- 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
- 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BPKAD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis BPKAD

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian kinerja suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian dari sisi anggaran, dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPKAD pada Tahun 2020 yang meliputi :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 14 kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 7.800 surat/nota dinas;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik targetnya 4 jenis kebutuhan;
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan target 5 unit;
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersional dengan target 47 unit;
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan target 36 Dokumen.
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan target untuk 4 orang;
7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan target 10 junit;
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target 30 Jenis;
9. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan dengan target 11 Jenis;
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target 12 kegiatan;
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 27 unit;
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 2 jenis;

13. Penyediaan Makanan & Minuman dengan target 4 jenis;
14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan target 2 jenis;

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 10 kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 0;
2. Pengadaan Meubeleur dengan target 5 unit;
3. Pengadaan Komputer dan perlengkapannya dengan target 21 unit;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan target 2 lokal Gedung Kantor BPKAD;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dengan target 1 unit;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan Target 46 unit;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 33 unit;
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target 1 unit.
9. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur dengan target 1 unit;
10. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya dengan target 30 unit;

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan target 5 orang.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 7 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (TAPKIN) dengan target 17 Dokumen;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan target 2 Dokumen;

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan target 3 Laporan;
 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Konsolidasi dengan target 2 Dokumen.
 5. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Konsolidasi dengan target 1 LKD.
 6. Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan target 48 laporan.
 7. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dengan target 19 Dokumen.
- V. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan target 13 Dokumen.
- VI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 33 kegiatan yaitu :
1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan target 1 Dokumen;
 2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target 2 Dokumen;
 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, target 1 Raperda;
 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dengan target 1 perbup;
 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan target 1 Raperda;
 6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan target 6 Perbup;
 7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, target 1 Raperda;
 8. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, target 1 Perbup;
 9. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Target 1 kegiatan;

10. Sertifikasi tanah milik pemerintah Kabupaten Pematang dengan target 488 Dokumen;
11. Pembayaran PBB aset daerah/BMD dengan target 78 bidang;
12. Pendistribusian Barang Milik Daerah dengan target 2 kali;
13. Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus Barang, RKBU dan RKPBU dengan target 5 Dokumen;
14. Penyusunan Laporan Semesteran BMD, target 4 laporan;
15. Penyelesaian pemindahtanganan dan penghapusan BMD dengan target 2 laporan;
16. Penyusunan Laporan Realisasi penerimaan BPKAD dengan target 12 laporan;
17. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan target 1 buku;
18. Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dengan target 30 Laporan;
19. Pengelolaan Kerugian Daerah dengan target 2 Laporan;
20. Pemantauan, pemanfaatan aset/BMD dengan target 4 laporan;
21. Penyusunan Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi) dengan target 2 laporan;
22. Pengelolaan Kas Daerah dengan target 24 Laporan;
23. Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS dengan target 2 Laporan;
24. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD oleh SKPKD dengan target 4 unit;
25. Penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan dengan target 5.000 Dokumen;
26. Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung dengan target 5.000 Dokumen;
27. Penyusunan Dokumen Penghentian Gaji PNSD dengan target 500 Dokumen;
28. Penyusunan Dokumen Pendukung Pembayaran Gaji PNSD dengan target 12.400 Dokumen;
29. Peningkatan Kompetensi Pengelola aset daerah dengan target 1 kegiatan;

30. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan target 2 aplikasi.
31. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil dan LKT dengan target 16 Laporan;
32. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan PPKD, Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan dengan target 2.846 Dokumen;
33. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas dengan target 300 Dokumen;

Pencapaian realisasi anggaran pada Tahun 2020 di BPKAD sebesar Rp. 5.102.133.764,00 dari anggaran sebesar Rp. 6.446.985.000,00 atau 79,14 %. Dari 66 Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdapat 16 Kegiatan yang capaian realisasi anggarannya dibawah 85%.

Tabel 2.1

PENJELASAN REALISASI KEGIATAN DI BAWAH 85%

KODE PROG /KEG	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA 2020	%	
01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran				
01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	50.000.000	39.542.442	79,08	Nilai Lelang alat berat lebih kecil dari perkiraan sehingga terdapat nilai sisa lelang alat berat pada Tahun 2020.
01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	17.500.000	14.309.225	81,77	Perkiraan Pagu biaya perpanjangan STNK per unit kendaraan dinas lebih besar dari biaya sebenarnya.
01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	16.877.000	84,39	Tidak optimalnya pembelian buku regulasi karena buku regulasi yang dibutuhkan tidak tersedia di pasaran.
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000.000	364.615.350	72,92	Kondisi Gedung yang masih baik, hanya memerlukan renovasi ruangan kerja untuk menyimpan dokumen dan arsip.
06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	500.000	0	0	Laporan Semesteran belum dicetak sehingga Belanja Cetak Laporan Semesteran tidak terserap.
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
15.04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan	124.000.000	98.747.526	79,64	Tidak terserapnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan BBM secara optimal karena pengiriman

KODE PROG /KEG	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA 2020	%	
	Keuangan Daerah				dokumen ke SKPD hanya dilakukan melalui TNDE, tidak mengirim hardcopy ke masing- masing SKPD disebabkan kondisi Pandemi Covid-19.
15.15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi	80.000.000	65.123.556	81,40	Sisa Anggaran merupakan Uang Lembur PNS dan Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah yang tidak digunakan
15.16	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pematang	984.077.000	191.543.420	19,46	Kebijakan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Surat Nomor : KU.01.04/1301-100/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang pengenaan Tarif Rp.0,00 untuk sertifikasi tanah aset instansi pemerintah dan Pemda. Kebijakan ini berdampak pada tidak terpakainya anggaran sertifikasi tanah milik Pemkab Pematang yang sudah terlanjur dipasang pada APBD Perubahan 2020.
15.23	Penetapan Status Pengguna BMD, SK Pengurus Barang, RKB dan RKPBU	35.000.000	24.132.200	68,95	Tidak Optimalnya realisasi Honorarium Pelaksanaan Kegiatan yang terjadi karena kebijakan dan regulasi pemberian honorarium kepada ASN.
15.25	Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	42.000.000	11.206.500	26,68	Belanja Jasa Lelang yang tidak terserap optimal karena nilai lelang dibawah limit pagu ketentuan lelang atau dibawah Rp. 50.000.000,00 sehingga cukup dilakukan melalui media selebaran. Sehingga belanja lelang masih tersisa cukup signifikan.
15.54	Pengelolaan Kerugian Daerah	35.000.000	11.719.190	33,48	Tidak optimalnya pelaksanaan rapat terkait penggantian kerugian daerah yang berdampak pada tidak terserapnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan BBM.

KODE PROG /KEG	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA 2020	%	
15.56	Pemantauan, Pemanfaatan Aset/ Barang Milik Daerah	109.800.000	86.125.784	78,44	Sisa Anggaran kegiatan ini merupakan Honorarium Jasa Panitia Penilai BMD dari KNKNL, yang tidak direalisasikan karena kegiatan penilaian aset belum tuntas diselesaikan.
15.57	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah (Konsolidasi)	90.000.000	63.423.500	70,47	Tidak dilaksanakannya kegiatan penyusunan Laporan BMD Semester I karena Aplikasi SIMDA BMD sedang dalam proses migrasi data.
15.58	Pengelolaan Kas Daerah	30.000.000	22.430.229	74,77	Berkurangnya frekuensi Rakor dlam rangka rekonsiliasi dan koordinasi pengelolaan kas daerah sehingga berdampak pada kurangnya penyerapan Belanja Makan Minum Kegiatan dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
15.64	Penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000	47.834.970	73,59	Kurang optimalnya penyerapan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang biasa digunakan untuk melakukan koordinasi terkait DAK Fisik. Kegiatan koordinasi jarang dilakukan menimbang adanya Pandemi Covid-19.

Dari sisi realisasi output, terdapat 2 kegiatan yang realisasi output kegiatannya tidak mencapai 100% yaitu :

1. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan. Kegiatan ini mentargetkan tersusunnya Dokumen RTP, Dokumen Pendukung Maturitas SPIP Self Assesment, Laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, dan Laporan Realisasi Fisik Kegiatan.
2. Kegiatan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya Agung. Target output kegiatan ini adalah pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya Agung sebanyak 488 Dokumen Sertifikat. Pada Tahun 2020 terealisasi sebanyak 437 Dokumen Sertifikat tanah milik Pemkab Pematang Jaya Agung. Sehingga realisasi output kegiatan sertifikasi tanah milik Pemkab Pematang Jaya Agung sebesar 89,55 %.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya Agung Tahun 2020 dapat diuraikan sebagaimana Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel :2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4	
	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan										
	Bidang Keuangan										
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan									
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnyasurat masuk dan surat keluar (surat/notdin)	46.000	38.200	7.800	7.800	100	8.000	54.000	13.500
01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air listrik dan internet (bulan)	20	16	4	4	100	4	24	6
01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya jaminan kendaraan dinas/ operasional (unit)	830	777	5	5	100	185	967	241.75
01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tercapainya prosentase Jasa Pemeliharaan & perizinan Kendaraan dinas (unit)	202	149	47	47	100	55	251	62.75
01	07	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Daerah	Tersusunnya SK Bupati tentang PA, KPA, dan bendaharaan SKPD (Dokumen) Tersusunnya Laporan Belanja Langsung BPKAD (laporan) Terlaksananya publikasi informasi (kali)	184	148	36	36	100	30	214	53.5
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor (bulan)	44	40	4	4	100	4	48	12
01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Mesin Ketik, Mesin Fotocopy dll. (bulan)	50	40	10	10	100	10	60	15

01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya rata-rata kebutuhan ATK (paket, buah)	180	150	30	30	100	30	210	52.5
01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya rata - rata kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan (paket, buah/lembar)	66	55	11	11	100	11	77	19.25
01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik penerangan kantor (kali)	60	48	12	12	100	12	72	18
01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (buah)	408	398	27	27	100	27	452	113
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedia koran, majalah dan buku perundang - undangan (jenis)	20	8	2	2	100	2	12	3
01	17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman dengan kebutuhan (jenis)	20	16	4	4	100	4	24	6
01	18	Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Dearah	Tersedianya jumlah koordinasi & Konsultasi Keluar daerah dengan kebutuhannya (jenis)	10	8	2	2	100	2	12	3
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi Sarana dan Prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan								
02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional (unit)	80	80	0	0	0	0	0	0
02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor (unit, paket)	15	11	0	0	100	3	14	3.5
02	10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur (unit)	55	42	5	5	100	15	62	15.5
02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan komputer terhadap kebutuhan (unit)	99	82	21	21	100	10	103	25.75
02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit gedung)	10	8	2	2	100	2	12	3
02	23	Pemeliharaan rutin/ berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan (unit)	5	4	1	1	100	1	6	1.5
02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/ Operasional (unit)	200	148	46	46	100	55	249	62.25
02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (unit)	165	132	33	33	100	33	198	49.5

02	28	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	5	4	1	1	100	1	6	1.5
02	29	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur (paket)	5	4	1	1	100	1	6	1.5
02	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan komputer & perlengkapannya (unit)	280	225	30	30	100	80	335	83.75
02	45	Pemeliharaan rutin / berkala software dan sistim informasi	Tersedianya Software Aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah dan BMD yang dapat berjalan dengan baik (sistem,jaringan)	7	5	2	2	100	2	9	2.25
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN								
05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi bagi ASN di BPKAD serta terlaksananya pengiriman peserta sosialisasi (orang)	436	351	5	5	100	85	441	110.25
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia								
06	01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya LKJIP (Dokumen) Tersusunnya PK dan RKT (Dokumen) Tersusunnya Dokumen Pendukung SAKIP (Dokumen)	79	62	17	17	100	17	96	24
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Tersusunnya laporan semesteran SKPD dan Pemerintah Daerah (Dokumen)	10	8	2	2	100	2	12	3
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan akhir tahun Pemerintah Daerah (Dokumen)	5	4	3	3	100	1	8	2
06	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Konsolidasian	Tersusunnya laporan semesteran dan Prognosis pemerintah daerah Konsolidasi (dokumen,laporan)	10	8	2	2	100	2	12	3
06	07	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun Konsolidasian	Tersedianya Laporan Akhir tahun (dokumen)	5	4	1	1	100	2	7	1.75
06	08	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporanrealisasi pendapatan dan belanja hasil rekonsialisasi SKPD & PPKD (laporan)	120	96	48	48	100	24	168	42
06	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya RTP Tersusunnya Dokumen Pendukung Maturitas SPIP Self Assesment Tersusunnya Laporan Evaluasi RKPD Triwulanan Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik Kegiatan Tersusunnya buku kumpulan tindak lanjut LHP BPK RI	14	7	19	17	89,47	7	31	7.75

09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia									
09	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya RKA/RKAP/DPA/DPPA BPKAD dan PPKD termasuk penggeserannya Tersusunnya Renstra dan Renja BPKAD beserta perubahannya (Dokumen)	59	49	13	13	100	175	237	59.25	
15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) - Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) - Persentase ketepatan waktu pencairan dana - Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Daerah - Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Realisasi Semesteran Pertama - Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan BMD - Persentase Pengamanan Aset Daerah - Persentase Pemindahtanganan Aset 									
15	03	Penyusunan kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya perbup tentang kebijakan akuntansi Pemda (dokumen) Tersusunnya buku saku ringkasan perbup tentang kebijakan akuntansi pemda (dokumen)	8	7	1	1	100	2	10	2.5	
15	04	Penyusunan Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Buku Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2019 (dokumen)	5	4	2	2	100	1	7	1.75	
15	06	Penyusunan rancangan Perda tentang APBD	Tersusunnya perda tentang APBD (dokumen)	5	4	1	1	100	1	6	1.5	
15	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD (Dokumen)	5	4	1	1	100	1	6	1.5	
15	08	Penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Tersusunnya perda tentang Perubahan APBD (Dokumen)	5	4	1	1	100	1	6	1.4	
15	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD (Dokumen)	5	4	6	6	100	1	11	2.75	
15	10	Penyusunan rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perda ttg Pertanggungjawaban an Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5	4	1	1	100	1	6	1.5	
15	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggung jawaban APBD (Dokumen)	5	4	1	1	100	1	6	1.5	

15	15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya bintek tentang pengelolaan keuangan daerah (Dokumen)	5	4	1	1	100	1	6	1.5
15	16	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pematang	Terfasilitasinya pembuatan sertifikat tanah milik Pemkab Pematang (sertifikat) Terpasangnya papan identitas tanah di atas tanah milik Pemkab Pematang dan dalam kondisi baik (papan)	743	611	488	437	89,55	140	1188	297
15	21	Pembayaran PBB Aset Daerah/BMD	Terbayarnya PBB tanah milik pemda (bidang)	522	444	78	78	100	80	602	150.5
15	22	Pendistribusian Barang Milik Daerah (BMD)	Terlaksananya distribusi BMD (kali)	15	12	2	2	100	4	18	4.5
15	23	Penetapan Status Pengguna BMD, SK Pengurus Barang, RKBU dan RKPBU	Tersusunnya SK Penetapan Status Barang daerah Tersusunnya SK Pengurus barang & perubahannya Tersusunnya RKBMD dan RKPBM Tahun (Dokumen)	25	20	5	5	100	4	29	7.25
15	24	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan BMD Semesteran Tersusunnya Laporan rekonsiliasi BMD (Laporan)	14	10	4	4	100	2	16	4
15	25	Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD (Laporan)	10	8	2	2	100	4	14	3.5
15	26	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD	Tersusunnya laporan realisasi penerimaan BPKAD (Laporan)	84	72	12	12	100	12	96	24
15	31	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang sistem informasi Akuntansi Keuangan Daerah (dokumen)	5	4	1	1	100	2	7	1.75
15	35	Peningkatan kapaitas aparatur pengelola keuangan daerah	Tersusunnya Laporan hasil pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah (Laporan)	360	330	30	30	100	50	410	102.5
15	54	Pengelolaan Kerugian Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah (Laporan)	15	13	2	2	100	4	19	4.75
15	56	Pemantauan, Pemanfaatan aset/BMD	Tersusunnya Laporan Hasil pemantauan pemanfaatan aset (Laporan)	44	40	4	4	100	24	66	16.5
15	57	Penyusunan Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi)	Tersusunnya Laporan Semesteran BMD konsolidasi	5	4	2	2	100	1	7	1.75

15	58	Pengelolaan Kas Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil koordinasi tentang pengelolaan kas daerah Tersusunnya laporan mutasi deposito (Laporan)	120	96	24	24	100	24	144	36
15	59	Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	Tersusunnya laporan bahan rancangan KUA PPAS selama satu tahun (laporan)	10	8	2	2	100	2	12	3
15	62	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD oleh SKPKD	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional SKPD	61	58	4	4	100	16	78	19.5
15	64	Penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan	Terlaksananya penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Pembiayaan	27.000	22.000	5.000	5.000	100	5000	32.000	8.000
15	65	Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	Terlaksananya penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	18.500	13.500	5.000	5.000	100	5000	23.500	5.879
15	66	Penyusunan Dokumen Penghentian Pembayaran Gaji PNSD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penghentian Pembayaran Gaji PNSD	4.500	4.000	500	500	100	500	5.000	1.250
15	67	Penyusunan Dokumen Pendukung Pembayaran Gaji PNSD	Terlaksananya penyusunan Dokumen pendukung Pembayaran Gaji PNSD	62.000	49.600	12.400	12.400	100	12.400	74.400	18.600
15	68	Peningkatan Kompetensi Pengelola Aset Daerah	Terlaksananya Bimtek/Sosialisasi terhadap pengurus barang Perangkat Daerah	13	11	1	1	100	2	14	3.5
15	69	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya penyusunan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	2	1	2	2	100	1	4	1
15	70	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi dan LKT	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer dari Pusat dan Laporan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Propinsi (Laporan)	108	84	16	16	100	16	116	29
15	71	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan PPKD, Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Tidak Langsung PPKD, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan, Laporan Penyaluran Dana Desa dan Verifikasi Berkas Pencairan Belanja Tidak Langsung PPKD (Laporan)	14.249	11.400	2.846	2.846	100	2.846	17.092	4.273
15	72	Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas	Tersusunnya Surat Penyediaan Dana SKPD dan Anggaran Kas (Dokumen)	1.425	1125	300	300	100	300	1.725	431,25

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam mencatat, membukukan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya.
2. Menyusun petunjuk teknis, sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Menyusun Rancangan Perda tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menyusun Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD;
5. Menyusun Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
6. Menyusun Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
7. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah;
8. Melakukan upaya pengamanan aset daerah dengan sertifikasi tanah milik Pemkab Pematang dan pemasangan papan identitas di atas tanah milik Pemkab Pematang;
9. Melakukan pembayaran PBB atas aset tanah milik Pemkab Pematang;
10. Menginventarisasi RKB dan RKP dari masing-masing SKPD serta mendistribusikan BMD ke SKPD sesuai usulan kebutuhan;
11. Menyusun Keputusan KDH tentang Penunjukkan Pengurus Barang dan Status Pengguna Barang;

12. Menyusun Laporan Semesteran BMD selaku SKPD dan menyusun Laporan Semesteran BMD Konsolidasi selaku SKPKD serta menyusun Laporan Tahunan BMD Konsolidasi;
13. Melaksanakan pemindahtanganan dan Penghapusan BMD atas usulan SKPD dan kebijakan pengguna BMD;
14. Mengelola penerimaan sewa tanah dan gedung, penerimaan penjualan bongkaran dan penerimaan atas penjualan kendaraan dinas roda dua/empat termasuk menyusun laporan pendapatannya;
15. Melakukan Monitoring atas pemanfaatan aset daerah;
16. Menyusun regulasi terkait Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah;
17. Melakukan Pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola keuangan di SKPD secara berkala;
18. Mengelola Kerugian Daerah dan memantau tindak lanjutnya sesuai ketentuan;
19. Melakukan Bimtek/Sosialisasi/Pendampingan kepada Pengurus Barang guna meningkatkan kompetensi pengurus barang selaku pengelola BMD di SKPD;
20. Mengatur ketersediaan dana Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
21. Mengelola cash idle untuk meningkatkan PAD Pemkab Pematang Jaya melalui pendapatan jasa giro dan bunga deposito serta menyusun Laporan Pendapatannya secara berkala;
22. Menginventarisasi dan menyimpan bukti-bukti kepemilikan BMD, bukti-bukti penyertaan modal dan bukti-bukti penempatan deposito;
23. Menyusun Laporan sebagai bahan rancangan KUA PPAS;
24. Menerbitkan SP2D Belanja dan Pembiayaan;
25. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;
26. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kassesuai ketentuan yang berlaku;
27. Melakukan pencatatan register Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
28. Mengelola Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Gaji PNSD se-Kabupaten Pematang Jaya beserta tunjangan kinerjanya;

29. Mengelola Belanja Tidak Langsung PPKD;
30. Mengelola penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
31. Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Keputusan Otorisasi;
32. Mempersiapkan bahan pertimbangan pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
33. Menyusun Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
34. Mengelola, meningkatkan dan mengembangkan sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD;
35. Memfasilitasi pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan untuk Perangkat Daerah.

Selain melaksanakan fungsi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan fungsi sebagai pengelola pendapatan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun pendapatan yang termasuk dalam Lain-Lain PAD yang sah.

PAD dan Dana Perimbangan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. PAD

- 1.1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- 1.1.1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

- 1.1.2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank

- 1.2. Lain-Lain PAD yang Sah

- 1.2.1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan

- 1.2.2. Penerimaan Jasa Giro

- 1.2.3. Penerimaan Bunga

- 1.2.4. Tuntutan Kerugian Daerah

- 1.2.5. Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan

- 1.2.6. Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan

- 1.2.7. Penerimaan dari Pengembalian

- 1.2.8. Penerimaan Lain-Lain

- 1.2.9. Pendapatan Sewa

2. Dana Perimbangan
 - 2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 2.1.1. Bagi Hasil Pajak
 - 2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
 - 2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 2.3. Dana Alokasi Khusus
 - 2.3.1. DAK Fisik
 - 2.3.2. DAK Non Fisik
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 3.1. Pendapatan Hibah
 - 3.1.1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah
 - 3.1.2. Pendapatan Hibah Dana BOS
 - 3.2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - 3.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
 - 3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 3.3.1. Bantuan Keuangan dari Propinsi
 - 3.4. Alokasi Dana Desa
 - 3.4.1. Alokasi Dana Desa
 - 3.5. Dana Insentif Daerah
 - 3.5.1. Dana Insentif Daerah

Untuk mengevaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dilakukan evaluasi atas ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu Indikator yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 yaitu “ Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah”. Target dan realisasi capaian kinerja atas Indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Indikator Hasil Opini BPK atas LKD

Hasil Opini BPK atas LKD	Tahun dikeluarkannya Opini BPK RI atas LKD				
	2016	2017	2018	2019	2020
Target	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Adapun IKU BPKAD Kabupaten Pematang Jaya yang mendukung Indikator RPJMD “ Hasil Opini BPK atas LKD “ yaitu :

1. Persentase Ketepatan Waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD. Sesuai Pasal 104 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penyampaian Raperda APBD paling lambat dilakukan pada awal bulan Oktober Tahun sebelumnya. Sedangkan sesuai dengan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berkenaan. Kategori ketercapaian indikator ini adalah 100% apabila tepat waktu (TW), 50% apabila tidak tepat waktu (TTW) dan 0% apabila tidak disampaikan.

IKU BPKAD ini didukung oleh 2 indikator program yaitu :

- a. Persentase Ketepatan waktu penyampaian RKA-SKPD
Penyusunan RKA/RKAP oleh SKPD merupakan bagian dari penyusunan APBD/Perubahan APBD. Apabila SKPD telah menyusun RKA/RKAP sesuai dengan ketentuan penganggaran dan selesai tepat waktu, maka hal ini akan

mendorong tercapainya target kinerja dari IKU BPKAD yang pertama.

b. Persentase Ketepatan waktu penyusunan SPD

Surat Penyediaan Dana akan tersusun dan terbit tepat waktu apabila telah memenuhi indikator bahwa SPD tersebut telah mengakomodir seluruh kelompok anggaran kas yang telah ditetapkan. Penyusunan SPD sangat tergantung pada anggaran kas yang dientry SKPD ke SIMDA Keuangan pada saat menyusun RKA/RKAP SKPD. Sehingga kedua indikator program ini tidak dapat diabaikan dalam pencapaian IKU pertama BPKAD.

2. Persentase Ketepatan Waktu penerbitan SP2D.

Rumusan ketercapaian indikator ini adalah jumlah SP2D yang diproses dalam waktu 3 hari sejak dibuatnya SPM SKPD dibanding Jumlah berkas SP2D yang diajukan oleh SKPD. Apabila semua SKPD menyusun SPM sesuai ketentuan maka penerbitan SP2D dapat dilaksanakan sesuai ketentuan (3 hari). Target dari IKU ini adalah 100% (tepat waktu atau 3 hari). IKU SP2D yang diterbitkan tepat waktu didukung oleh satu indikator program yaitu Ketepatan Waktu Pencairan Dana. Indikator Program Ketepatan Waktu Pencairan Dana diukur dengan membandingkan jumlah SP2D yang telah diterbitkan dan ditransfer dananya ke rekening penerima dibanding dengan jumlah berkas usulan pencairan dana dari SKPD dalam satu tahun anggaran.

3. Persentase Pemanfaatan Aset Daerah.

Rumusan ketercapaian indikator ini adalah jumlah aset yang telah dimanfaatkan dibanding jumlah seluruh aset daerah yang seharusnya dimanfaatkan. Target dari IKU ini 90%.

IKU ini didukung 3 indikator program sebagai berikut :

a. Persentase Pengamanan Aset.

Rumusan ketercapaian indikator program ini adalah jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang yang telah diproses sertifikatnya dibanding jumlah keseluruhan tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang.

b. Persentase Pemindahtanganan Aset.

Rumusan ketercapaian indikator program ini adalah jumlah realisasi pemindahtanganan aset daerah dibanding jumlah aset daerah yang diusulkan SKPD untuk dipindahtangankan.

c. Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan BMD.

Laporan BMD disusun paling lambat bulan Maret tahun berikutnya. IKU BPKAD ini sangat terkait dengan kinerja pengurus barang SKPD dalam penyusunan Laporan BMD. BPKAD mengupayakan pendampingan kepada pengurus barang SKPD dalam melakukan entry data ke SIMDA BMD, inventarisasi aset dan penyusunan Laporan BMD agar Laporan BMD Pemkab Pematang yang merupakan Konsolidasi dari Laporan BMD SKPD dapat disusun sesuai ketentuan (tepat waktu). Tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah akan mempengaruhi data Laporan Keuangan Daerah karena data aset merupakan bagian dari Neraca yang merupakan salah satu unsur Laporan Keuangan Daerah.

4. Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD. Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD. IKU ini didukung satu Indikator Program yaitu ketepatan waktu penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semester Pertama. Berdasarkan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. BPKAD melakukan desk pada saat penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran, diharapkan dengan langkah ini maka Raperda pertanggungjawaban APBD dapat disampaikan kepada DPRD sesuai target atau 100% (tepat waktu).

5. Persentase Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK.

Ketentuan penyampaian Laporan Keuangan Daerah ke BPK RI di atur pada Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Indikator program yang mendukung IKU ini adalah ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 190 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD. Apabila SKPD telah menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu maka hal ini akan mempercepat proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang. Hasil opini dari Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh BPK RI pada Tahun 2019 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” . Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target IKU BPKAD yang terdapat pada RPJMD telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Kabupaten Pematang telah mencapai WTP sebanyak 5 tahun berturut turut yaitu WTP atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun 2016, LKD Tahun 2017, LKD Tahun 2018, LKD Tahun 2019 serta LKD Tahun 2020. Keberhasilan tersebut menjadi pemacu Pemerintah Kabupaten Pematang untuk mempertahankan prestasi tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	Indikator Program	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Ketepatan Waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD. (Minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk APBD dan Minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berjalan untuk Perubahan APBD)	100 %	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Rencana Kerja Anggaran SKPD	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
			Persentase Ketepatan waktu penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD)	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
2.	Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D (3 hari sesuai SOP)	100 %	Persentase Pencairan Dana tepat waktu	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
3.	Persentase Pemanfaatan aset daerah. (Jumlah aset daerah yang telah dimanfaatkan dibanding jumlah	90%	Persentase Pengamanan Aset	60%	-	-	-	50%	-	-	-	
			Persentase Pemindahtangana n Aset	90%	-	-	-	90%	-	-	-	

	seluruh aset daerah yang seharusnya dimanfaatkan)		Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan BMD	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
4.	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD (bulan Juni tahun berikutnya)	100 %	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
5.	Persentase Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK (bulan Maret tahun berikutnya)	100 %	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	-	100%	-	-	100%	-	-	-	
6.	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	15	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai Ketentuan	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	
			Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	-	60%	60%	60%	-	-	-	-	
7.	Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	20	Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	
8.	Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	15	Persentase Penyampaian Raperda	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	

			Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD sesuai Ketentuan									
			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	
9.	Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	50 %	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	

2.3 Hasil Evaluasi SAKIP pada BPKAD Tahun 2020

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) Instansi-nya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Adapun Hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang adalah sebesar 60,26 dengan kategori Baik, akuntabilitasnya kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Hasil evaluasi tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 56,84 dengan kategori Cukup (memadai).

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang yaitu melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain tugas tersebut,

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Pematang Jaya melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).

Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Menetapkan Surat Pencairan Dana (SPD);
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Selaku BUD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), adapun fungsi PPKD tersebut sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat isu-isu penting termasuk hal-hal yang merupakan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tetapi BPKAD telah berupaya mengambil langkah-langkah solusi sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dengan berlakunya regulasi tentang keterbukaan informasi tersebut mengharuskan BPKAD sebagai perangkat daerah pengelola keuangan dan aset untuk mempublikasikan keuangan dan aset yang dikelolanya kepada masyarakat sebatas informasi/data-data yang tidak termasuk dalam pengecualian. BPKAD dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam menyajikan data-data pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun langkah-langkah yang telah diupayakan oleh BPKAD dalam melaksanakan amanat tersebut adalah :

- Mempublikasikan Perda APBD, Perda Perubahan APBD dan Perda Pertanggungjawaban APBD kepada publik melalui media

masa (surat kabar) dan Website BPKAD (pemalangkab.go.id/bpkad)

- Mempublikasikan Laporan Keuangan daerah, Ringkasan APBD, Lampiran III dan IV Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ke Website BPKAD Kabupaten Pemalang.
 - Menyusun buku Laporan Keuangan Daerah, APBD dan Perubahan APBD serta lampiran-lampirannya untuk didistribusikan kepada perangkat daerah se-Kabupaten Pemalang serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
 - Melaksanakan sistem SP2D on line dalam pencairan dana yang bersumber dari APBD.
 - Secara berkala meng-upload kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang2 di BPKAD Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ke website BPKAD. Adapun kegiatan yang di upload seperti lelang kendaraan dan alat berat, fasilitasi pengelolaan keuangan kepada perangkat daerah se-Kabupaten Pemalang, desk RKA dan RKAP, desk pendapatan dan belanja daerah, desk penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis, rapat-rapat dalam rangka penyusunan regulasi pengelolaan keuangan seperti peraturan bupati tentang TGR, Hibah Bansos, kebijakan akuntansi dan lain-lain.
2. Terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan agar optimal tetapi terkendala anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan secara bertahap antara lain : sertifikasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang serta inventarisasi Aset/BMD. Jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang keseluruhan 1.728 bidang tanah. Luasan tersebut tidak dapat diproses serifikatnya sekaligus mengingat kemampuan keuangan daerah sehingga pensertifikatan tanah dilaksanakan bertahap. Setiap tahun ditargetkan 40 sampai dengan 50 bidang tanah untuk dilaksanakan proses sertifikasinya. Pada tahun 2020, sesuai dengan amanat dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mempercepat dan memprioritaskan proses pensertifikatan tanah untuk mencegah hilangnya aset daerah karena keterlambatan proses pengurusan bukti kepemilikan maka ditargetkan pensertifikatan tanah Pemda sebanyak 300 bidang dengan

perkiraan biaya per bidangnya Rp.2.500.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang sangat concern terhadap pengelolaan BMD.

Dalam hal inventarisasi aset, masalah yang dihadapi adalah kompetensi SDM Pengurus barang. Sebagian besar pengurus barang belum memahami pengelolaan BMD sesuai Pedoman Pengelolaan BMD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 khususnya ketentuan tentang kodifikasi barang daerah. BPKAD khususnya Bidang Akuntansi dan Aset Daerah berupaya melaksanakan bimtek, sosialisasi dan pendampingan kepada pengurus barang SKPD dalam melaksanakan inventarisasi BMD dan entry data BMD ke SIMDA BMD. Selain kompetensi SDM pengurus barang, hal lain yang menjadi kendala adalah sering bergantinya personil pengurus barang SKPD sehingga mengakibatkan tidak optimalnya laporan barang yang menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain faktor anggaran dan SDM, terdapat faktor lain yaitu pengiriman data aset dari SKPD sering terlambat. Hal ini mengakibatkan banyak aset Pemerintah Kabupaten Pemalang yang belum terbayar PBB dan asuransinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPKAD telah melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke semua perangkat daerah di Kabupaten Pemalang dalam rangka rekonsiliasi data aset yang tercatat di KIB SKPD dengan SIMDA BMD.
 - Melaksanakan cek fisik dan cek lapangan atas data aset yang tercatat pada KIB SKPD.
 - Melaksanakan Bimbingan teknis kepada pengurus barang tentang pengelolaan Barang Milik Daerah terkait pencatatan, pelaporan, penghapusan dan pertanggungjawabannya.
 - Meng-upgrade versi Simda BMD agar lebih kompatibel sebagai aplikasi pendukung penyajian data aset daerah.
3. Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Daerah membutuhkan ketepatan waktu dan keakuratan data baik dalam penganggaran dan realisasinya. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan sistem aplikasi yang memadai dan jaringan yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset yang dilaksanakan secara on line.

BPKAD telah mengambil langkah solusi untuk permasalahan tersebut yaitu :

- Pemeliharaan sistem dan jaringan SIMDA Keuangan serta SIMDA BMD secara berkala. BPKAD bekerjasama dengan BPKP dalam pemeliharaan aplikasi SIMDA Keuangan maupun SIMDA BMD. Secara berkala aplikasi tersebut di up grade dan disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelaporan keuangan dan aset daerah. Dari sisi jaringan, BPKAD bekerja sama dengan pihak PT Lawang Sewu. BPKAD menandatangani MOU dengan PT Lawang Sewu untuk penggunaan jaringan Cloud atas SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. Sehingga kedua aplikasi tersebut dapat digunakan secara online oleh semua SKPD dimana pun dan kapan pun. Sebagai pendukung penggunaan cloud, BPKAD bekerjasama dengan pihak PT Telkom dalam penyediaan konektivitas internet yang memadai.
- BPKAD menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi SKPD yang melakukan entry data anggaran maupun realisasi di ruang komputer BPKAD. Peningkatan fasilitas tersebut berupa peningkatan jaringan internet dengan menggunakan FO, penggunaan server khusus/tersendiri di ruang komputer dan penyediaan komputer PC all in one dengan spesifikasi yang cukup.
- Dalam rangka mengantisipasi mutasi pejabat struktural pada tataran teknis pengelolaan aplikasi sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah maka BPKAD menyusun manual book tentang cara mengoperasikan SIMDA Keuangan, agar pejabat yang menggantikan dapat meneruskan program yang telah direncanakan oleh pejabat sebelumnya, dengan cara mempedomani buku tersebut.
- Bekerjasama dengan BAPPEDA dan Diskominfo, BPKAD berniat mengimplementasikan e-budgeting dalam pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan e-planning (SIMDA Integrated) yang ada di BAPPEDA.

Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*):

Kerjasama Organisasi antar bidang tidak dapat dipisahkan baik internal maupun eksternal sedangkan keberhasilan atau kegagalan

organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya selalu menyesuaikan diri dan berupaya tetap dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang baik internal maupun eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan Program yang telah direncanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah untuk menggunakan metode analisis SWOT, terdiri dari 4 Strategi :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
4. Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman.

A. Kekuatan (*Strengths*), berupa:

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan kelembagaan organisasi dalam Program dan kegiatan maupun pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

- Adanya Peraturan Perundang-Undangan nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya dan Himpunan Peraturan Bupati Pematang Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya. Regulasi tersebut merupakan pedoman bagi semua perangkat daerah sebagai komponen Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya untuk bergerak dan melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mendukung visi misi Kabupaten Pematang Jaya. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Pematang merupakan pedoman bagi BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang yang digunakan sebagai petunjuk secara teknis operasional bagi seluruh personil BPKAD Kabupaten Pematang;

- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai dalam rangka menjalankan Organisasi, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai merupakan modal bagi pelaksanaan pencapaian tujuan;
- Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh semua unsur Pemerintah Kabupaten Pematang, merupakan target yang harus dicapai setiap tahun oleh ASN sebagai bentuk output dari kinerja personal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang;
- Adanya koordinasi serta jaringan komunikasi kerja terhadap lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, tersedianya anggaran untuk melaksanakan Program dan Kegiatan serta motivasi dan kemauan kerja yang tinggi.

B. Kelemahan (*Weakness*), berupa:

- Koordinasi Internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas yang kadang masih kurang;
- Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang;
- Masih adanya pembagian tugas pekerjaan yang belum proposional, penempatan pegawai yang kurang memperhatikan kompetensi, kemampuan dan ketrampilan;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang Keuangan/Akuntansi;
- Kurangnya koordinasi pada masing-masing bidang;
- Masih adanya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang yang belum bersertifikat.
- Masih terdapat kelemahan pada SIMDA BMD yang belum terintegrasi secara optimal dengan SIMDA Keuangan.

C. Peluang (*Opportunities*), berupa:

- Terjalannya kinerja yang baik dengan mitra kerja yaitu pihak perbankan, BUMD, KPPN, Kementerian Keuangan dan pihak lainnya;
- Dukungan yang baik dan positif dari publik terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
- Tuntutan dari masyarakat dalam hal keterbukaan informasi menjadi motivasi kerja BPKAD untuk selalu berinovasi dan berkinerja atas dasar regulasi dan ketentuan yang berlaku.
- Tercapainya opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dalam tiga tahun berturut-turut atas LKD Tahun 2016,2017 dan 2018. Hal ini menjadi pemacu dan pemicu peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ke depannya agar selalu optimal, terukur, akuntabel, transparan dan reliable.

D. Tantangan (*Threats*), berupa:

- Mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah secara umum sehingga perlu penterjemahan dan penafsiran teknis yang dituangkan dalam regulasi yang merupakan kebijakan lokal pemerintah Kabupaten Pematang Jaya berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 terkait dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah menuntut respon yang cepat untuk menyesuaikan urusan program kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2021 agar sesuai regulasi tersebut serta upgrade sistem/aplikasi pengelolaan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang selama ini digunakan dalam penyusunan KUA PPAS, RKPD, RKA/RKAP/DPA/DPPA;
- Beban tugas pekerjaan semakin meningkat sebanding dengan tuntutan kinerja dan output yang optimal;
- Masih banyak pelaksana yang belum menguasai akuntansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Adanya fungsi BPKAD selaku PPKD yang mengelola anggaran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada desa, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang melibatkan perangkat daerah lain sebagai pengampunya, dalam merealisasikan anggaran belanja tidak langsung PPKD dan pengeluaran pembiayaan. Kondisi ini membutuhkan kompetensi yang memadai, kemampuan

berkoordinasi yang baik, ketrampilan dalam memahami regulasi terkait, menterjemahkan realita atau kondisi sebenarnya yang membutuhkan solusi agar sinkron antara penganggaran, peruntukkan dan realisasi belanja.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih pada plikada serentak tanggal 9 Desember 2020. Visinya yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang Adil, Makmur, Agamis Dan Ngangeni”.

Dengan Misi :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan

Dari seluruh kegiatan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Pemalang, yang terkait secara langsung dalam tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah misi ke 2 yaitu Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun uraian dari masing- masing frasa Visi tersebut adalah :

- **Adil**, adalah Keadaan / kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antara wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- **Makmur**, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya;
- **Agamis**, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya

menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup;

- **Ngangeni**, adalah Kondisi Kabupaten Pematang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pematang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pematang itu ngangeni”*.

Faktor-Faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD jika ditinjau dari sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang pada tahun 2020:

Faktor Penghambat :

1. Jumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Pematang yang dapat dikelola dalam bentuk sewa tanah dan gedung belum terinventarisir secara optimal karena faktor kurangnya SDM, sehingga perolehan pendapatan sewa tidak optimal dan tidak dapat mendukung peningkatan PAD dengan nilai yang signifikan. Hal tersebut menimbulkan potensi hilangnya pendapatan sewa.
2. Terbatasnya jumlah uang daerah dalam bentuk cash idle yang dapat didepositokan dalam jangka waktu tertentu dalam tahun berjalan sehingga perolehan deposito dan jasa giro pun tidak dapat mencapai nilai yang signifikan dalam mendukung peningkatan PAD.
3. Adanya aset daerah berupa tanah yang belum bersertifikat menimbulkan kemungkinan hilangnya aset daerah tersebut karena belum jelas kepemilikannya.
4. Inventarisasi aset Daerah dalam SIMDA BMD belum dapat terkoneksi secara langsung dengan SIMDA Keuangan karena kedua aplikasi tersebut belum terintegrasi.

Faktor Pendorong :

1. Adanya dana perimbangan dari pusat, Untuk mendukung pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang.
2. Sarana dan Prasarana yang Memadai, Mempermudah dan memperlancar pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan.
3. Semangat dan Disiplin Kerja dari ASN diBPKAD Kabupaten Pemalang, dapat mendorong upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun SKPD lain secara optimal.
4. Adanya Peluang peningkatan kompetensi bagi pelaksana BPKAD Kabupaten Pemalang dengan mengikuti Bimbingan Teknis. Dengan adanya kesempatan ini membuka peluang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPKAD Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

Isu-Isu Strategis merupakan hal-hal penting dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang direncanakan. Upaya keras yang baik berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kualitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditingkatkan lagi mengingat masih adanya tenaga kontrak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang produktifitas kerja, berinovasi dan penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat disusun laporan yang akuntabel.
- c. Tingkat koordinasi baik internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditingkatkan agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah perlu selalu ditingkatkan dengan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah, monitoring dan evaluasi hasil inventarisasi aset pada perangkat daerah serta segera dilaksanakan integrasi SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan agar dapat disajikan laporan aset yang akuntabel dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

- e. Profesionalisme dan disiplin aparatur daerah, kemampuan memfasilitasi, melayani dan mencari solusi merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan;

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tabel 2.5 ini disajikan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan analisis kebutuhan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Pematang

						Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Penti ng	
Kode Program/ Kegiatan						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	KEUANGAN								550.036.990.000	KEUANGAN					550.036.990.000
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Indeks Reformasi Birokrasi di BPKAD	BPKAD	53	12.383.850.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi di BPKAD	BPKAD	53	12.383.850.000		
						Nilai SAKIP di BPKAD	BPKAD	60,01			Nilai SAKIP di BPKAD	BPKAD	60,01			
5	02	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	BPKAD	100%	26.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	BPKAD	100%	26.000.000		
5	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah	BPKAD	3 Dokumen	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah	BPKAD	3 Dokumen	4.000.000	
5	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	BPKAD	70 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	BPKAD	70 Dokumen	1.000.000	
5	02	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	BPKAD	100 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	BPKAD	100 Dokumen	2.000.000	
5	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	BPKAD	70 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	BPKAD	70 Dokumen	6.000.000	
5	02	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	BPKAD	100 Dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	BPKAD	100 Dokumen	8.000.000	
5	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah LKjIP Perangkat Daerah - Jumlah Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan - Jumlah Laporan	BPKAD	21 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah LKjIP Perangkat Daerah - Jumlah Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan - Jumlah Laporan Realisasi	BPKAD	21 Laporan	3.000.000	

							Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Penti ng
Kode Program/ Kegiatan							Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								Realisasi Kinerja triwulanan - Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang tersusun					Kinerja triwulanan - Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang tersusun				
5	02	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulanan (Level Eselon 2,3 dan 4) - Jumlah Laporan Evaluasi Realisasi RKP	BPKAD	60 Laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulanan (Level Eselon 2,3 dan 4) - Jumlah Laporan Evaluasi Realisasi RKP	BPKAD	60 Laporan	2.000.000		
5	02	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	100%	7.012.850.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	100%	7.012.850.000		
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan (Gaji = 3.582.442.000, Tunjangan = 3.181.409.000)	BPKAD	48 orang	6.763.850.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan (Gaji = 3.582.442.000, Tunjangan = 3.181.409.000)	BPKAD	48 orang	6.763.850.000		
5	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/Bendahara - Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS	BPKAD	25 SK	40.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/Bendahara - Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS	BPKAD	25 SK	40.000.000		
5	02	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	- Jumlah Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala BPKAD terkait Pengeluaran Keuangan - Jumlah Berkas yang diverifikasi (20 SK, 44 Berkas)	BPKAD	64 Dokumen	195.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	- Jumlah Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala BPKAD terkait Pengeluaran Keuangan - Jumlah Berkas yang diverifikasi (20 SK, 44 Berkas)	BPKAD	64 Dokumen	195.000.000		
5	02	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun, LPPD dan LKPJ Perangkat Daerah	BPKAD	3 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun, LPPD dan LKPJ Perangkat Daerah	BPKAD	3 Laporan	5.000.000		

						Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Penti ng
Kode Program/ Kegiatan						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	02	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen dan laporan sebagai bahan tanggapan pemeriksaan perangkat daerah	BPKAD	10 Dokumen	3.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen dan laporan sebagai bahan tanggapan pemeriksaan perangkat daerah	BPKAD	10 Dokumen	3.000.000	
5	02	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran BPKAD yang tersusun	BPKAD	39 laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran BPKAD yang tersusun	BPKAD	39 laporan	3.000.000	
5	02	01	2	03	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Administrasi Penatausahaan BMD	BPKAD	100%	5.000.000	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Penatausahaan BMD	BPKAD	100%	5.000.000	
5	02	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	- Jumlah Laporan Bulanan BMD ,Triwulanan, Semesteran dan Laporan Rekonsiliasi BMD SKPD	BPKAD	17 laporan	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	- Jumlah Laporan Bulanan BMD ,Triwulanan, Semesteran dan Laporan Rekonsiliasi BMD SKPD	BPKAD	17 laporan	5.000.000	
5	02	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	BPKAD	100%	200.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	BPKAD	100%	200.000.000	
5	02	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	- Jumlah ASN yang mengikuti Bintek/Seminar/ Workshop/Diklat	BPKAD	60 Orang	200.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah ASN yang mengikuti Bintek/Seminar/ Workshop/ Diklat	BPKAD	60 Orang	200.000.000	
5	02	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	BPKAD	100%	440.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	BPKAD	100%	440.500.000	
5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Perbaikan Instalasi Listrik dan Pembelian Alat Penerangan yang terlaksana selama setahun	BPKAD	12 kegiatan	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Perbaikan Instalasi Listrik dan Pembelian Alat Penerangan yang terlaksana selama setahun	BPKAD	12 kegiatan	7.500.000	
5	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana selama	BPKAD	5 unit	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana selama setahun	BPKAD	5 unit	10.000.000	

Kode Program/ Kegiatan						Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							setahun									
5	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli	BPKAD	10 Jenis	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli	BPKAD	10 Jenis	5.000.000	
5	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor, Makanan dan Minuman harian/kegiatan yang tersedia	BPKAD	32 Jenis	60.752.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor, Makanan dan Minuman harian/kegiatan yang tersedia	BPKAD	32 Jenis	60.752.000	
5	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia selama setahun	BPKAD	11 Jenis	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia selama setahun	BPKAD	11 Jenis	50.000.000	
5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terlaksana selama setahun	BPKAD	12 kegiatan	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terlaksana selama setahun	BPKAD	12 kegiatan	15.000.000	
5	02	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pembelian Bendera dan umbul umbul	BPKAD	50 buah	5.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pembelian Bendera dan umbul umbul	BPKAD	50 buah	5.000.000	
5	02	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	- Jumlah jenis Penyediaan Makanan dan Minuman rapat dan Makan Minum Tamu yang terlaksana selama setahun	BPKAD	2 Jenis	79.248.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	- Jumlah jenis Penyediaan Makanan dan Minuman rapat dan Makan Minum Tamu yang terlaksana selama setahun	BPKAD	2 Jenis	79.248.000	
5	02	01	2	06	09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah yang terlaksana dalam rangka koordinasi dan konsultasi selama setahun	BPKAD	50 kegiatan	200.000.000	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah yang terlaksana dalam rangka koordinasi dan konsultasi selama setahun	BPKAD	50 kegiatan	200.000.000	
5	02	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah Jasa Penataan Arsip	BPKAD	8 Orang	8.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah Jasa Penataan Arsip	BPKAD	8 Orang	8.000.000	

Kode Program/ Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Penti ng
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan	BPKAD	100%	3.540.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan	BPKAD	100%	3.540.000.000		
5	02	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Pengadaan Mobil untuk Operasional pejabat pada Perangkat Daerah (1 Unit Camry utk Bupati @Rp.700jt, 1 unit Fortuner utk Wabup @Rp.600jt, 2 unit innova utk Ka Kesbang dan Ka BPBD @Rp.400jt dan 3 unit Avansa @Rp.250jt utk eselon 3)	BPKAD	7 unit	2.407.230.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Pengadaan Mobil untuk Operasional pejabat pada Perangkat Daerah (1 Unit Camry utk Bupati @Rp.700jt, 1 unit Fortuner utk Wabup @Rp.600jt, 2 unit innova utk Ka Kesbang dan Ka BPBD @Rp.400jt dan 3 unit Avansa @Rp.250jt utk eselon 3)	BPKAD	7 unit	2.407.230.000	
5	02	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (2 unit avansa utk operasional Dekranasda dan operasional Bidang di Diskoperindag)	BPKAD	1 Unit	942.770.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (2 unit avansa utk operasional Dekranasda dan operasional Bidang di Diskoperindag)	BPKAD	1 Unit	942.770.000	
5	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	- Jumlah Pengadaan Meubeleur selama setahun	BPKAD	3 unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	- Jumlah Pengadaan Meubeleur selama setahun	BPKAD	3 unit	10.000.000	
5	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	BPKAD	9 Unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	BPKAD	9 Unit	150.000.000	
5	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor selama setahun	BPKAD	3 unit	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor selama setahun	BPKAD	3 unit	25.000.000	
5	02	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang terlaksana selama setahun	BPKAD	10 buah	5.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang terlaksana selama setahun	BPKAD	10 buah	5.000.000	

						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Penti ng	
Kode Program/ Kegiatan						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
5	02	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa yang menunjang operasional Perangkat Daerah	BPKAD	100 %	871.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa yang menunjang operasional Perangkat Daerah	BPKAD	100 %	871.500.000		
5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	- Jumlah surat masuk, surat keluar, nota dinas dan dokumen surat menyurat lainnya yang tercatat dan terdistribusi secara tertib selama setahun	BPKAD	7.800 surat/ Notdin	18.000.000	Penyediaan Jasa surat Menyurat	- Jumlah surat masuk, surat keluar, nota dinas dan dokumen surat menyurat lainnya yang tercatat dan terdistribusi secara tertib selama setahun	BPKAD	7.800 surat/ Notdin	18.000.000		
5	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah kebutuhan Air, Telephone, Listrik, Internet dan Cloud selama setahun	BPKAD	4 Jenis	660.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah kebutuhan Air, Telephone, Listrik, Internet dan Cloud selama setahun	BPKAD	4 Jenis	660.000.000		
5	02	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama setahun	BPKAD	30 Unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama setahun	BPKAD	30 Unit	25.000.000		
5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (K3 dan alat alat kebersihan) yang tersedia selama setahun	BPKAD	4 Orang	168.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (K3 dan alat alat kebersihan) yang tersedia selama setahun	BPKAD	4 Orang	168.500.000		
5	02	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	BPKAD	100 %	288.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	BPKAD	100 %	288.000.000		
5	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 perorangan dan jabatan milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya	BPKAD	50 Unit	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 perorangan dan jabatan milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya	BPKAD	50 Unit	15.000.000		

						Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Penti ng
Kode Program/ Kegiatan						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	- Jumlah STNK Kendaraan Operasional Dinas Roda milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya	BPKAD	3 Unit	3.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	- Jumlah STNK Kendaraan Operasional Dinas Roda milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya	BPKAD	3 Unit	3.000.000	
5	02	01	2	09	05	Pemeliharaan Meubeleur	- Jumlah Meubeleur yang terlaksananya selama setahun	BPKAD	5 unit	5.000.000	Pemeliharaan Meubeleur	- Jumlah Meubeleur yang terlaksananya selama setahun	BPKAD	5 unit	5.000.000	
5	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	BPKAD	30 unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	BPKAD	30 unit	25.000.000	
5	02	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	- Jumlah Mobil Operasional dan Mobil Jabatan yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	BPKAD	53 Unit	110.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	- Jumlah Mobil Operasional dan Mobil Jabatan yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	BPKAD	53 Unit	110.000.000	
5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	BPKAD	2 lokal	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	BPKAD	2 lokal	100.000.000	
5	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	BPKAD	15 unit	25.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	BPKAD	15 unit	25.000.000	

						Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Penti ng
Kode Program/ Kegiatan						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	02	01	2	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan perlengkapan gedung kantor yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	BPKAD	12 kegiatan	5.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan perlengkapan gedung kantor yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	BPKAD	12 kegiatan	5.000.000	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai Ketentuan		100 %	528.183.140.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai Ketentuan		100 %	528.183.140.000
							Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum		60 %				Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum		60 %	
							Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan		100 %				Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan		100 %	
							Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Ketentuan		100 %				Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Ketentuan		100 %	
							Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan		100 %				Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan		100 %	
5	02	02	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penggangan Perangkat Daerah		100%	1.610.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penggangan Perangkat Daerah		100%	1.610.000.000		
5	02	02	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS		1 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS		1 Dokumen	200.000.000	

Kode Program/ Kegiatan					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Penti ng		
					Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1					2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
5	02	02	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS		1 Dokumen	50.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS		1 Dokumen	50.000.000	
5	02	02	2	01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang diverifikasi		5000 Dokumen	25.000.000		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang diverifikasi		5000 Dokumen	25.000.000	
5	02	02	2	01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi		5000 Dokumen	25.000.000		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi		5000 Dokumen	25.000.000	
5	02	02	2	01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi		5000 Dokumen	100.000.000		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi		5000 Dokumen	100.000.000	
5	02	02	2	01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi		5000 Dokumen	100.000.000		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi		5000 Dokumen	100.000.000	
5	02	02	2	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun		2 Dokumen	435.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun		2 Dokumen	435.000.000	
5	02	02	2	01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun		5 Dokumen	435.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun		5 Dokumen	435.000.000	

					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Penti ng
Kode Program/ Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Perubahan APBD									
5	02	02	2	01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		2 Laporan	30.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Laporan Data Kapasitas Anggaran Pendapatan (Penetapan dan Perubahan)		2 Laporan	30.000.000	
5	02	02	2	01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		2 Laporan	30.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Data Kapasitas Anggaran Belanja Daerah (Penetapan dan Perubahan)		2 Laporan	30.000.000	
5	02	02	2	01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		2 Laporan	30.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Laporan Data Kapasitas Anggaran Pembiayaan (Penetapan dan Perubahan)		2 Laporan	30.000.000	
5	02	02	2	01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah	120 orang	150.000.000	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah		120 orang	150.000.000	
5	02	02	2	02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya fungsi perbendaharaan Daerah	100%	705.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya fungsi perbendaharaan Daerah		100%	705.000.000	
5	02	02	2	02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengelolan Kas Daerah - Jumlah Laporan Mutasi Deposito - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Jasa Giro dan Bunga Deposito	48 Laporan	156.566.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengelolan Kas Daerah - Jumlah Laporan Mutasi Deposito - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Jasa Giro dan Bunga Deposito		48 Laporan	156.566.000	
5	02	02	2	02	03	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas perangkat	300 Dokumen	30.000.000	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas perangkat daerah yang		300 Dokumen	30.000.000	

					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Penti ng	
Kode Program/ Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
					Penerbitan anggaran Kas dan SPD	daerah yang diterbitkan selama setahun (150 SPD, 150 Anggaran Kas)				Penerbitan anggaran Kas dan SPD	diterbitkan selama setahun (150 SPD, 150 Anggaran Kas)					
5	02	02	2	02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Jumlah Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) yang disusun - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi yang disusun - Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dana TPG - Jumlah Laporan Realisasi DAK Fisik (12 LKT, 4 BA Rekon Bagi Hasil Pajak Prop, 4 Laporan Rekon TPG, 12 Laporan Realisasi DAK Fisik)		32 Laporan	45.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Jumlah Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) yang disusun - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi yang disusun - Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dana TPG - Jumlah Laporan Realisasi DAK Fisik (12 LKT, 4 BA Rekon Bagi Hasil Pajak Prop, 4 Laporan Rekon TPG, 12 Laporan Realisasi DAK Fisik)		32 Laporan	45.000.000	
5	02	02	2	02	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	- Jumlah Laporan Posisi Kas - Jumlah SP2D yang diterbitkan - Jumlah Dokumen SKPP yang diterbitkan (240 Lap Poskas, 5.000 SP2D, 500 SKPP)		5740 Dokumen	294.584.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoton gan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	- Jumlah Laporan Posisi Kas - Jumlah SP2D yang diterbitkan - Jumlah Dokumen SKPP yang diterbitkan (240 Lap Poskas, 5.000 SP2D, 500 SKPP)		5740 Dokumen	294.584.000	
5	02	02	2	02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	- Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PPKD - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran BPKAD - Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan		72 Laporan	15.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	- Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PPKD - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran BPKAD - Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan		72 Laporan	15.000.000	

					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Penti ng
Kode Program/ Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	02	02	2	02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD yang tersusun selama setahun		1 Perbup	90.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD yang tersusun selama setahun		1 Perbup	90.000.000
5	02	02	2	02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah personil pengelola keuangan pada perangkat daerah yang mengikuti Pembinaan/Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah		75 orang	73.850.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah personil pengelola keuangan pada perangkat daerah yang mengikuti Pembinaan/Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah		75 orang	73.850.000
5	02	02	2	03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Terlaksananya Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100%	715.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100%	715.000.000
5	02	02	2	03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD dan PPKD		48 Laporan	30.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD dan PPKD		48 Laporan	30.000.000
5	02	02	2	03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Konsolidasi, Laporan Keuangan Bulanan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Triwulanan Konsolidasi yang tersusun selama setahun		14 Laporan	35.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Konsolidasi, Laporan Keuangan Bulanan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Triwulanan Konsolidasi yang tersusun selama setahun		14 Laporan	35.000.000
5	02	02	2	03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan Pemda Akhir Tahun yang tersusun		14 Laporan	65.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan Pemda Akhir Tahun yang tersusun		14 Laporan	65.000.000

					Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Penti ng
Kode Program/ Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	02	02	2	03	05	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun selama setahun		2 Dokumen	475.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun selama setahun		2 Dokumen	475.000.000	
5	02	02	2	03	07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TP/TGR		2 Laporan	25.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TP/TGR	Jumlah Laporan Penyelesaian TP/TGR		2 Laporan	25.000.000	
5	02	02	2	03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda		1 Perbup	35.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	Jumlah Perbup Kebijakan Akuntansi Pemda yang tersusun selama setahun		1 Perbup	35.000.000	
5	02	02	2	03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda		2 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda	- Jumlah Manual Book dan Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi		2 Dokumen	50.000.000	
5	02	02	2	04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100%	524.923.140.000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersalurkannya Bantuan Keuangan, Bantuan Korban Bencana dan Bagi Hasil kepada Masyarakat		100%	524.923.140.000	
5	02	02	2	04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		211 Desa	494.571.067.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang menerima Bantuan Keuangan		211 Desa	494.571.067.000	
5	02	02	2	04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		50 Dokumen	20.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Proses Penyaluran Belanja Tidak Terduga		50 Dokumen	20.000.000.000	
5	02	02	2	04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		211 Desa	10.352.073.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang menerima Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		211 Desa	10.352.073.000	

					Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Penti ng	
Kode Program/ Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2	05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Tersedianya Sistem Informasi yang mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	230.000.000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi yang mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	230.000.000	
5	02	02	2	05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistim Informasi yang dibuat dan dipelihara		2 SIM	80.000.000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistim Informasi yang dibuat dan dipelihara		2 SIM	80.000.000	
5	02	02	2	05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang mengikuti Bimtek operasional sistem penyusunan Laporan Keuangan (SIMDA)		75 Orang	150.000.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang mengikuti Bimtek operasional sistem penyusunan Laporan Keuangan (SIMDA)		75 Orang	150.000.000	
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BMD				Presentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah		100%	9.470.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN BMD	Presentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah		100%	9.470.000.000	
5	02	03	2	01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan		8 dokumen	9.470.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan		8 dokumen	9.470.000.000	
5	02	03	2	01	03	Penyusunan perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBM yang tersusun selama setahun		2 dokumen	30.000.000	Penyusunan perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBM yang tersusun selama setahun		2 dokumen	30.000.000	
5	02	03	2	01	05	Penatausahaan BMD	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pengguna BMD dan Pengurus BMD		4 Dokumen	15.000.000	Penatausahaan BMD	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pengguna BMD dan Pengurus BMD		4 Dokumen	15.000.000	
5	02	03	2	01	07	Pengamanan BMD	- Jumlah Tanah Milik Pemda yang terproses sertifikatnya - Jumlah Tanah Pemda yang terpasangi Papan Identitas Tanah Pemda (200 sertifikat, 100 papan)		300 Bidang	710.000.000	Pengamanan BMD	- Jumlah Tanah Milik Pemda yang terproses sertifikatnya - Jumlah Tanah Pemda yang terpasangi Papan Identitas Tanah Pemda (200 sertifikat, 100 papan)		300 Bidang	710.000.000	
5	02	03	2	01	08	Penilaian BMD	Jumlah Aset yang dinilai		10 unit	50.000.000	Penilaian BMD	Jumlah Aset yang dinilai		10 unit	50.000.000	

					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Penti ng	
Kode Program/ Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	03	2	01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian		2 Laporan	25.000.000						
5	02	03	2	01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	- Jumlah alat berat dan kendaraan dinas roda empat yang dijaminakan selama setahun - Jumlah Laporan Pemindahtanganan dan Penghapusan - Jumlah Laporan Monitoring Pemanfaatan BMD - Jumlah SPT PBB tanah milik Pemkab yang terbayar - Jumlah Pengadaan Tanah - Jumlah Aset yang telah dimanfaatkan		155 Unit, 4 Laporan, 75 SPT, 1 paket, 51 lokasi	8.500.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD		- Jumlah alat berat dan kendaraan dinas roda empat yang dijaminakan selama setahun - Jumlah Laporan Pemindahtanganan dan Penghapusan - Jumlah Laporan Monitoring Pemanfaatan BMD - Jumlah SPT PBB tanah milik Pemkab yang terbayar - Jumlah Pengadaan Tanah - Jumlah Aset yang telah dimanfaatkan		155 Unit, 4 Laporan, 75 SPT, 1 paket, 51 lokasi	8.500.000.000
5	02	03	2	01	12	Penyusunan Laporan BMD	- Jumlah Laporan BMD Akhir Tahun Konsolidasi - Jumlah Laporan Semesteran BMD Konsolidasi - Jumlah Laporan Bulan dan Triwulanan BMD Konsolidasi		14 Laporan	40.000.000	Penyusunan Laporan BMD		- Jumlah Laporan BMD Akhir Tahun Konsolidasi - Jumlah Laporan Semesteran BMD Konsolidasi - Jumlah Laporan Bulan dan Triwulanan BMD Konsolidasi		14 Laporan	40.000.000
5	02	03	2	01	13	Pembinaan Pengelolaan BMD	- Jumlah personil yang mengikuti Sosialisasi/Bimtek pengelola BMD		75 Orang	100.000.000	Pembinaan Pengelolaan BMD		- Jumlah personil yang mengikuti Sosialisasi/Bimtek pengelola BMD		75 Orang	100.000.000

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain melaksanakan fungsinya selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengelola Belanja Tidak Langsung PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/ Kelurahan (Musrenbangdes/ Musrenbangkel). Usulan yang lolos verifikasi pada musrenbangdes/ musrenbangkel diteruskan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) untuk dibahas lebih lanjut sesuai skala prioritas Kecamatan. Hasil musrenbangkec diteruskan kembali pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (MusrenbangKab) untuk diakomodir sesuai kapasitas anggaran dan prioritas pembangunan Kabupaten. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 terdapat 155 usulan masyarakat yang diakomodir BPKAD melalui Belanja Tidak Langsung PPKD atau Belanja Non Program. Adapun rincian usulan tersebut sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Pokok-Pokok Pikiran dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif/ Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Kec Ampelgading		500 meter	200.000.000	BPKAD
2	Pengaspalan Jalan ke Lapangan Sepak Bola	Kec Ampelgading		600 meter	200.000.000	BPKAD
3	Perbaikan / Rehab Balai Desa Banjardawa	Kec Taman		1 paket	100.000.000	BPKAD
4	Pembangunan Talud Lapangan Sepak Bola Desa kabunan	Kec Taman		350 meter	100.000.000	BPKAD
5	Drainase RT 14 dan RT 15 Desa Gondang	Kec Taman		200 meter	100.000.000	BPKAD
6	Pembuatan Talud sungai Buangan Desa Jrasah	Kec Taman		400 meter	250.000.000	BPKAD
7	Pembuatan Talud Jalan Desa Dan Talud sungai Elon, Desa Kejambon	Kec Taman		400 meter	250.000.000	BPKAD
8	Pembuatan Talud Jalan Desa Sitemu RT 01, RW. 02 Dukuh Penanggalan	Kec Taman		450 meter	250.000.000	BPKAD
9	pembangunan Talud Kompleks Makam Desa Saradan	Kec Pernalang		210 meter ³	150.000.000	BPKAD
10	Pengaspalan jalan Dusun Karang Sari Barat Desa Karang Sari	Kec Pulosari		450 meter	150.000.000	BPKAD
11	Pengaspalan Jalan Dusun Sipendil, Desa Gunungsari	Kec Pulosari		425 meter	150.000.000	BPKAD
12	Pengaspalan jalan Dusun Kubang, Desa Cikendung	Kec Pulosari		250 meter	150.000.000	BPKAD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif/ Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
13	Pengaspalan Jalan Dusun Tundangan, Desa Batusari	Kec Pulosari		450 meter	150.000.000	BPKAD
14	Pengaspalan Jalan Dusun Wanasari, Desa Penakir	Kec Pulosari		350 meter	150.000.000	BPKAD
15	Pengaspalan Jalan Dusun Kantong, Desa Siremeng	Kec Pulosari		350 meter	150.000.000	BPKAD
16	Pengaspalan Jalan Dusun Tangkeban, Desa Nyalembeng	Kec Pulosari		250 meter	100.000.000	BPKAD
17	Pengaspalan jalan Dusun Tumbu, Desa Pulosari	Kec Pulosari		225 meter	100.000.000	BPKAD
18	pengaspalan jalan 150 m Rt03, rt4 RW3 kendalsari	Kec Petarukan		150 m	75.000.000	BPKAD
19	pengaspalan 350 meter lebar 2meter Tempuan Rt08rw3 Kendalsari	Kec Petarukan		350 m	100.000.000	BPKAD
20	pengaspalan jalan 450 meter lebar 3 meter rt07/08,10 dusun 3 Karangasem	Kec Petarukan		450 m	197.000.000	BPKAD
21	Talud 100 meter Rt40 RW06 Desa Widodaren Petarukan	Kec Petarukan		100 m	50.000.000	BPKAD
22	pengaspalan 300 meter jalan panjaitan dusun I banglarangan	Kec Ampelgading		300 m	100.000.000	BPKAD
23	Penerangan jalan / Tenaga surya jalan Lenggerong menuju Peguyangan	Kec Bantarbolang		50 titik	150.000.000	BPKAD
24	Rabat beton jalan	Kec Ulujami		225 meter	150.000.000	BPKAD
25	Drainase jalan	Kec Bodeh		350 meter	150.000.000	BPKAD
26	pengaspalan jalan	Kec Ulujami		1300 meter	150.000.000	BPKAD
27	Pembangunan Rabat Beton, RT 4, RT. 5 RW 04, Desa Ujunggede	Kec Ampelgading		200 meter	200.000.000	BPKAD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif/ Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
28	Peninggian jalan RT 01, dan 05 RW. 07 Desa Limbangan	Kec Ulujami		390 meter	230.000.000	BPKAD
29	peninggian Jalan RT. 04, RT. 05 dan RT 06 RW. 08 Desa Limbangan	Kec Ulujami		750 meter	450.000.000	BPKAD
30	Pembuatan Tribun dan Toilet Lapangan Sepak bola Desa Limbangan	Kec Ulujami		1 paket	200.000.000	BPKAD
31	Jalan Rabat beton RT 01 dan RT. 02 RW 01 Desa Ketapang	Kec Ulujami		200 meter	200.000.000	BPKAD
32	Pembangunan Lapangan Bola Volli Desa Ketapang	Kec Ulujami		25 meter	50.000.000	BPKAD
33	Pembanunan Saluran Drainase Desa Blendung	Kec Ulujami		250 meter	100.000.000	BPKAD
34	Jalan Rabat beton dari TK Pertiwi sampai Moto lele Desa Kaliprau	Kec Ulujami		300 meter	100.000.000	BPKAD
35	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Sukorejo	Kec Ulujami		1 paket	100.000.000	BPKAD
36	Pengaspalan jalan RT, 10, 11, Dusun 02, Dukuh Wonosari Desa Karangasem	Kec Petarukan		1350 meter ²	100.000.000	BPKAD
37	Rehab Kantor Balai Desa banglarangan	Kec Ampelgading		1 paket	100.000.000	BPKAD
38	Rabat beton jalan RT 07, 08 RW 04 Desa Karangtalok	Kec Ampelgading		480 meter	150.000.000	BPKAD
39	Rabat Beton Jalan Zaenal Arifin RT 27, 28 RW. 12 Desa Karangtalok	Kec Ampelgading		300 meter	150.000.000	BPKAD
40	Rabat Beton Jalan RT 04, 05 RW. 03 dusun Rowopanggung, Desa Iser	Kec Petarukan		210 meter	200.000.000	BPKAD
41	Makadam Jalan Dusun Rowopanggung RT. 10 RW. 04 Desa Iser	Kec Petarukan		400 meter	200.000.000	BPKAD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif/ Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
42	Rabat Beton Jalan Dusun Rowopanggung RT. 01,02 RW. 03 Desa Iser	Kec Petarukan		250 meter	200.000.000	BPKAD
43	Rehab kantor Balai Desa Ujunggede	Kec Ampelgading		1 paket	200.000.000	BPKAD
44	Rabat Beton jalan Musholla Baitunnur	Kec Bantarbolang		65 meter	60.000.000	BPKAD
45	Senderan Sumur Besi Desa Pegiringan	Kec Bantarbolang		97 meter	95.000.000	BPKAD
46	Talud Lapangan sepak bola Desa Kalimas	Kec Randudongkal		160 meter	150.000.000	BPKAD
47	Talud Irigasi RT. 027 RW. 004 Desa Kreyo	Kec Randudongkal		100 meter	50.000.000	BPKAD
48	Talud Irigasi RT. 024-025 RW. 004 Desa Kreyo	Kec Randudongkal		100 meter	50.000.000	BPKAD
49	Pengaspalan jalan Karangmoncol - Randudongkal	Kec Randudongkal		320 meter	200.000.000	BPKAD
50	Pengaspaln jalan Dukuh Lumpang RT. 008 RW. 006 desa Bantarbolang	Kec Bantarbolang		200 meter	100.000.000	BPKAD
51	Senderan Makam Desa Mangli RT. 009 RW. 002	Kec Randudongkal		50 meter	100.000.000	BPKAD
52	Pembangunan Drainase Dusun Boda, Desa Pakembaran	Kec. Warungpring		75 meter	100.000.000	BPKAD
53	pengaspalan jalan Turi Desa Banjaranyar	Kec Randudongkal		120	100.000.000	BPKAD
54	Pengaspalan jalan Dukuh Petahunan RT. 02 RW. 01 Desa Kebongede	Kec Bantarbolang		250 meter	100.000.000	BPKAD
55	Pengaspalan jalan RT 02, RW. 03 Desa Warungpring	Kec. Warungpring		1000 meter	200.000.000	BPKAD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif/ Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
56	Pengaspalan jalan RT. 38 RW. 05 Dukuh Longok Desa Cibuyur	Kec. Warungpring		650 meter	150.000.000	BPKAD
57	Pengaspalan Jalan RT. 21 RW. 02 Blok Jengkol Desa Rembul	Kec Randudongkal		900 meter	200.000.000	BPKAD
58	Pengaspalan jalan RT. 16-27 (RW. 02-04) Desa Kreyo	Kec Randudongkal		500 meter	100.000.000	BPKAD
59	Pengaspalan jalan RT. 05 / 02 Desa Banjaranyar	Kec Randudongkal		1000 meter	200.000.000	BPKAD
60	Irigasi Pertanian Sawah Kanem	Kec.Belik		500 meter	200.000.000	BPKAD
61	Perbaikan Gedung Balai Desa Sikasur	Kec.Belik		1 paket	200.000.000	BPKAD
62	Pembangunan Saluran Irigasi dan Pintu Air 3 unit, Bulakan Barat, Desa Bulakan	Kec.Belik		360 meter	200.000.000	BPKAD
63	Pengaspalan Jalan Dusun Krajan Desa Beluk	Kec.Belik		235 meter	200.000.000	BPKAD
64	Pengaspalan jalan Kalisaleh	Kec.Belik		600 meter	200.000.000	BPKAD
65	Pemeliharaan Jalan dan lingkungan RT1 RW2 Desa Saradan	Kec.Pemalang		500 m	180.000.000	BPKAD
66	pemeliharaan jalan rabat beton RT01 RW02 Desa Sungapan	Kec.Pemalang		200 m	80.000.000	BPKAD
67	Pembuatan talud jalan penghubung Desa Gondang - Desa Jrasah dan Desa Sitemu	Kec. Taman		600 meter	250.000.000	BPKAD
68	Talud jalan dan pengerosokan jalan menuju makam Sambungyuda	Kec. Taman		400 meter	200.000.000	BPKAD
69	Drainase jalan	Kec. Taman		300 meter	150.000.000	BPKAD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif/ Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
70	Drainase jalan wiryorejo	Kec Ampelgading		300 meter	150.000.000	BPKAD
71	Batu sender dan Pavingisasi area jalan pemakaman Bau Rekso, Desa Bojongnangka	Kec.Pemalang		1 paket	75.000.000	BPKAD
72	Rabat beton	Kec.Bodeh		335 meter	150.000.000	BPKAD
73	Draibase jalan	Kec.Bodeh		160 meter	75.000.000	BPKAD
74	Pengaspalan jalan RT 1, 2 ,3 8, 9 RW 01 dan Rw 02 karena kondisinya rusak	Kec. Taman		800 meter	200.000.000	BPKAD
75	Pengaspalan jalan gang Rw 04 dikarenakan jalannya rusak	Kec. Taman		250 meter	100.000.000	BPKAD
76	Pengaspalan jalan lingkungan Rt 07 Rw 05 dikarenakan rusak	Kec. Taman		550 meter	200.000.000	BPKAD
77	Rabat Beton Rt 01 Rt 02 Rt 03 Rw 08 dan Rw 09 dikarenakan kondisi tanah labil sering jalan rusak	Kec. Taman		350 meter	50.000.000	BPKAD
78	Rabat Beton Rt 05 Rt 06 Rw 01 dusun 1 dikarenakan tanah labil sehingga jalannya sering rusak	Kec. Taman		200 meter	30.000.000	BPKAD
79	Drainase jalan Rt 05 Rt 06 Rw 01 dikarenakan sudah rusak	Kec. Taman		200 meter	20.000.000	BPKAD
80	Talud Jalan	Kec.Bodeh		200 meter	20.000.000	BPKAD
81	Pengaspalan jalan dan Talud Jalan pertanian RT 28 RW 04 Dusun Kranding barat, Desa Cibuyur	Kec. Warungpring		500 meter	100.000.000	BPKAD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif/ Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
82	Pengaspalan Jalan Desa RT. 19/02 sampai RT. 32/04 . Jalan Bayur-dusun Kranding, desa Cibuyur	Kec. Warungpring		1000 meter	200.000.000	BPKAD
83	senderan jalan jl bandawasa dari RW10 RW9 Desa Banyumudal Moga 500meter	Kec. Moga		200 juta	200.000.000	BPKAD
84	rabat beton jalan Rt03 RW10 Desa Banyumudal Moga 100 meter	Kec. Moga		50 juta	50.000.000	BPKAD
85	jalan makam Temanggal RT04 dan RT02 Panjang 200 m & 4 buah Lampu Tenaga Surya	Kec. Moga		65 juta	65.000.000	BPKAD
86	Rabat Beton jalan RT02 RW9 Desa Banyumudal Kec Moga 100 meter	Kec. Moga		60 juta	60.000.000	BPKAD
87	Rabat Beton Jalan Desa Banyumudal rt05 rw 09 rt01 rw 10 Moga 100 meter	Kec. Moga		30 juta	30.000.000	BPKAD
88	Pengaspalan Jalan Desa Tumbal	Kec. Comal		1000 meter	90.000.000	BPKAD
89	Rabat Beton/Senderan Jalan Desa dukuh madugowong desa Karanganyar RT 02/03	Kec. Bantarbolang		100 meter	150.000.000	BPKAD
90	Pengaspalan jalan gajah nguling dukuh pelem karena kondisinya rusak	Kec.Pulosari		500 meter	200.000.000	BPKAD
91	Pengaspalan jalan dukuh gereja karena kondisi jalan sudah rusak	Kec.Pulosari		1000 meter	175.000.000	BPKAD
92	Pengaspalan jalan	Kec. Randudongkal		300 meter	140.000.000	BPKAD
93	Talud Lapangan Sepak bola	Kec. Randudongkal		100 meter	90.000.000	BPKAD
94	Pembuatan talud jalan ringin dungkar karena talud rusak	Kec. Moga		50 meter	175.000.000	BPKAD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif/ Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
95	Senderan / talud jalan	Kec. Randudongkal		200 meter	150.000.000	BPKAD
96	Pengaspalan jalan lingkar Rt 02 Rt 04 Rw 01 karena kondisi jalan rusak	Kec. Belik		300 meter	165.000.000	BPKAD
97	Senderan / talud makam	Kec. Randudongkal		200 meter	150.000.000	BPKAD
98	Pengaspalan jalan	Kec. Randudongkal		300 meter	150.000.000	BPKAD
99	Drainase jalan	Kec. Belik		200 meter	200.000.000	BPKAD
100	Renovasi Pagar Balai Desa	Kec. Petarukan		1 paket	130.000.000	BPKAD
101	Pembuatan drainase	Kec. Petarukan		150 meter	22.500.000	BPKAD
102	Drainase Rt 01 Rw 05	Kec. Petarukan		1 paket	25.000.000	BPKAD
103	Pengaspalan jalan Rt 04 Rw 7 sampai Rt 04 Rw 08	Kec. Petarukan		120 meter	50.000.000	BPKAD
104	Rabat Beton Desa Mojo RT 004, 005 RW 002 dan RT 001/003, Kec. Ulujami	Kec. Ulujami		270 meter	200.000.000	BPKAD
105	Pengaspalan Jalan Dusun 1 RT 01-02 Desa Gandu, Kec. Comal	Kec. Comal		300 meter	150.000.000	BPKAD
106	Pemeliharaan Jl. Desa Penghubung RT 07-10 RW 01 Desa Belik	Kec. Belik		1 paket	100.000.000	BPKAD
107	Perbaikan lurung dkh pulasari, Desa Suru RT 12 .kec. Bantarbolang	Kec. Bantarbolang		1 paket	25.000.000	BPKAD
108	Perbaikan lurung dkh weringin Ds Pedagung RT. 08 rw. 02 1,30 cm p. 200 m2, Kec. Bantarbolang	Kec. Bantarbolang		1 paket	25.000.000	BPKAD
109	Pengaspalan jalan desa Nurul Islam Randudongkal Rt.50 Rw.05 Desa Randudongkal kecamatan	Kec. Randudongkal		1 paket	100.000.000	BPKAD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif/ Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	Randudongkal ukuran L : 3M p : 200 M					
110	Pengaspalan jln menuju pemakaman Ds purana p.200 m2 l 2 m2, Kec. Bantarbolang	Kec. Bantarbolang		1 paket	70.000.000	BPKAD
111	Rabat Beton jalan Lapangan - Benowo Park Desa Penggarit	Kec. Taman		300 meter	200.000.000	BPKAD
112	Pengaspalan Jalan RT 02 RW 07 Desa Bulakan, Kec. Belik	Kec. Belik		1 paket	200.000.000	BPKAD
113	Pembangunan Talud	Kec. Randudongkal		200 meter	200.000.000	BPKAD
114	rabat beton jalan benteng RW 2 Desa Penggarit Taman	Kec. Taman		400 m	200.000.000	BPKAD
115	Rabat beton jalan dan perbaikan jembatan lingkungan RT 6, rabat beton RT 2, dan RT 1 di RW 2 desa penggarit	Kec. Taman		300 m	200.000.000	BPKAD
116	Rabat beton jalan lingkaran utara RW1 Desa Penggarit sepanjang 80 meter	Kec. Taman		40 juta	40.000.000	BPKAD
117	Rabat beton jalan benteng RW 5 gedugan desa jebed selatan sepanjang 400 meter	Kec. Taman		200 juta	200.000.000	BPKAD
118	Pembangunan MD drainase 40 dusun 6 RW 6 desa sokawangi	Kec. Taman		450 m	200.000.000	BPKAD
119	Pembuatan talud jalan Ternate RT 03 RW 04 dusun 02 desa banjardawa (jalan menuju SMPIT)	Kec. Taman		400 m	200.000.000	BPKAD
120	Rabat beton jalan (RT01-02) dan (RT 07-09) RW 02 desa penggarit	Kec. Taman		100 juta	100.000.000	BPKAD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif/ Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
121	Pengaspalan jalan RT10 RW02 desa pecangakan kec. Comal	Kec. Comal		100 m	100.000.000	BPKAD
122	drainase panjang 2x370m lokasi RT01-02-03 RW 1 Desa Gedeg Comal	Kec. Comal		370 m	150.000.000	BPKAD
123	Pengaspalan Jalan Pulau Putri RW 02/03, Desa Saradan, Kec. Pemalang	Kec. Pemalang		500 meter	200.000.000	BPKAD
124	Pembuatan talud jalan Rt 11 Rw 4 karena kondisi jalan yang rusak	Kec. Puloasari		900 meter	175.000.000	BPKAD
125	Pengaspalan Jalan Jalan dusun 3 Desa Gintung	Kec. Comal		200 meter	175.000.000	BPKAD
126	Pengaspalan jalan Rt 22 Rw 5 Dusun IV Desa Wanarata	Kec. Bantarbolang		900 m3	200.000.000	BPKAD
127	Pengaspalan jalan dusun bongkot Rt 15 sampai Rt 17 Desa karangmoncol	Kec. Randudongkal		2100 m3	190.000.000	BPKAD
128	Pengaspalan jalan dusun bengkung Rt 14 sampai dengan Rt 20 Desa mereng	Kec. Warungpring		900 m3	150.000.000	BPKAD
129	Pengaspalan jalan Rt 05 sampai Rt 21 Desa Tanahbaya	Kec. Randudongkal		2100 m3	150.000.000	BPKAD
130	Pengaspalan jalan lingkak clebak Rt 59 sampai Rt 62 Desa Randudongkal	Kec. Randudongkal		2700 m3	100.000.000	BPKAD
131	Pengaspalan jalan dusun krajan 01 Rt 013 sampai dengan Rt 15 Desa Kejene	Kec. Randudongkal		1125 m3	100.000.000	BPKAD
132	Pengaspalan jalan Rt 07 - Rt 08 Desa longkeyang karena jalannya rusak	Kec. Bodeh		500 meter	175.000.000	BPKAD
133	Pengaspalan jalan Rt 19 dusun larangan desa jatingarang karena jalannya sudah rusak	Kec. Bodeh		500 meter	175.000.000	BPKAD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif/ Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
134	Pengaspalan jalan gang mawar 03 desa kauman karena sudah rusak	Kec. Comal		150 meter	100.000.000	BPKAD
135	Peningkatan jalan pemukiman dusun V dan dusun VI desa susukan	Kec. Comal		1 paket	75.000.000	BPKAD
136	Pembuatan rabat beton Rt 18 / Rw 8 dan Rt 16 / Rw 7 Desa Danasari	Kec. Pemalang		400 meter	100.000.000	BPKAD
137	Pengaspalan Jaln Dukuh Panggang Sumur Pejaten	Kec. Ulujami		1 paket	175.000.000	BPKAD
138	Pengaspalan Jalan Dukuh Karangpoh	Kec. Pulosari		1500 meter	200.000.000	BPKAD
139	Pengaspalan Jalan KaliKeji DesaBulakan	Kec. Belik		700 meter	150.000.000	BPKAD
140	Pengaspalan Jalan Dk. Cikalong Rt. 01/05 Gendoang	Kec. Moga		700 meter	100.000.000	BPKAD
141	Pengaspalan / Perbaikan jalan poros dusun Tamansari	Kec. PEmalang		300 meter	200.000.000	BPKAD
142	Pengaspalan jalan RT 02 RW 07 Desa Bojongnangka	Kec. Pemalang		1500 meter ²	200.000.000	BPKAD
143	Bantuan Dana Pembangunan Balai Desa Banjarsari	Kec. Pemalang		1 paket	100.000.000	BPKAD
144	Pengaspalan jalan Desa Gandu RT 01 /04	Kec. Comal		600 meter	150.000.000	BPKAD
145	Pengaspalan Jalan Desa Ambokulon RT 01 RW 01	Kec. Comal		600 meter	150.000.000	BPKAD
146	Pengaspalan Jalan Desa Tumbal RT 05 RW 01	Kec. Comal		600 meter	180.000.000	BPKAD
147	Pengaspalan jalan desa Purwosari dusun 2 dan 3 Depan Balai Desa	Kec. Comal		600 meter	150.000.000	BPKAD
148	Rabat Beton Jalan Desa Kebandaran	Kec. Bodeh		200 meter	200.000.000	BPKAD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif/ Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
149	Rabat Beton Jalan Lapangan sampai Benowo Park Desa Penggarit	Kec. Taman		300 meter	200.000.000	BPKAD
150	Peninggian jalan di RT 01 RW. 07 Desa Limbangan	Kec. Ulujmai		100 meter	60.000.000	BPKAD
151	Talud irigasi dukuh Kaliruyung RT. 01/02 Desa Bantarbolang	Kec. Bantarbolang		200 meter	100.000.000	BPKAD
152	Pengaspalan jalan Dukuh tengah RT. 04/05 desa Bantarbolang	Kec. Bantarbolang		251 meter	100.000.000	BPKAD
153	Talud Lapangan Sepak Bola Desa Kalimas	Kec. Randudongkal		160 meter	150.000.000	BPKAD
154	Pengaspalan jalan RT 05/02 desa Pakembaran	Kec. Warungpring		200 meter	200.000.000	BPKAD
155	Pengerasan jalan Beton Desa Sitemu RT. 04 dan RT 02 RW. 02 Dukuh Penanggalan	Kec. Taman		300 meter	300.000.000	BPKAD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 diarahkan pada *“Pemulihan Ekonomi yang didukung oleh Reformasi Struktural”*. Penentuan tema dan sasaran dilakukan dengan memperhatikan Sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2020, dan kebijakan pembangunan tahun 2021, serta beberapa isu strategis. Sedangkan Visi Pembangunan nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 adalah *“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*. Untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan 9 misi pembangunan nasional yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka negara kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, presiden Republik Indonesia memberikan arahan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil,

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global.

2. Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan dua undang-undang. Pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan Kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM).
4. Penyederhanaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Keuangan

Arah kebijakan Kementrian Keuangan diselaraskan dengan agenda Pembangunan Nasional serta Tujuan dan Sasaran Kementrian Keuangan. Adapun arah kebijakan Kementrian Keuangan tersebut sebagai berikut :

1. *Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan*

- a. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang fiscal dan sector keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19.
- b. Pemberian Insentif Fiskal dan Prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19.
- c. Penyusunan Kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian.

- d. Penyempurnaan dan Perbaikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan.
- e. Perumusan Strategi kebijakan makro fiskal untuk APBN yang sehat dan berkelanjutan.
- f. Penyusunan kebijakan pengembangan instrument-instrumen fiskal yang efektif untuk mendukung sustainable environment.
- g. Peningkatan produktifitas dan daya saing nasional, serta penguatan neraca transaksi berjalan dan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat fundamental ekonomi jangka menengah.
- h. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan daya saing.
- i. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengembangan sector tertentu.
- j. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di internal Kementrian Keuangan atau dengan K/L Lainnya.
- k. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif.
- l. Penguatan kebijakan sector keuangan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk memperkuat system keuangan.

2. *Penerimaan Negara yang Optimal*

- a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya.
- b. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protocol kesehatan terkait covid-19.
- c. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui system elektronik (PMSE).
- d. Pengembangan Layanan Pajak, Kepabean dan Cukai serta PNBPN berbasis digital yang berfokus pada user experience

dan user friendly.

- e. Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai serta pemetaan potensi PNBP.
- f. Modernisasi system administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP.
- g. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai.
- h. Penguatan kerja sama dengan Kementrian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengamanan penerimaan negara.
- i. Penguatan Joint program penerimaan di lingkungan Kementrian Keuangan.
- j. Peningkatan Kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan territorial.
- k. Penguatan Pengawasan Perpajakan dan PNBP serta Pemberantasan Penyelundupan dan Barang-barang illegal.
- l. Integrasi dan Konektivitas pelayanan ekspor impor dengan K/L dan negara-negara mitra.
- m. Mendorong penguatan efektivitas dan efisiensi kinerja logistik nasional.

3. *Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas*

- a. Prioritas belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien dan tetap akuntabel.
- b. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antar program maupun antara pusat dan daerah termasuk peningkatan efektifitas penggunaan Dana Desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah dampak krisis nasional di desa.
- c. Perumusan kebijakan relaksasi dan refocusing belanja

- K/L, Penggunaan transfer ke daerah dan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dan/atau kondisi krisis/darurat nasional serta menstimulasi percepatan pemulihan layanan publik dan perekonomian.
- d. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran dan lebih efisien dengan implementasi new thinking of working melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta antar stakeholder terkait dengan tetap menjaga aspek good governance.
 - e. Penguatan value for money, peningkatan evidence based budgeting dan monev kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
 - f. Pemantapan penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta Implementasi Redesign Sistem Penganggaran K/L dan daerah berdasarkan standarisasi program/kegiatan, Outcome/output, satuan biaya, struktur dan kode akun, serta system pengelolaan keuangan daerah terintegrasi.
 - g. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (Integrated Funding) untuk mempercepat pencapaian outcome/output yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.
 - h. Penerapan sistem asimetrik pengelolaan Transfer ke Daerah berdasarkan kebutuhan layanan dasar public dan kinerja daerah, serta karakteristik kekhususan daerah untuk mempercepat pemerataan layanan publik antar daerah.
 - i. Pengembangan Dana Transfer Khusus dan Sistem Insentif untuk meningkatkan daya saing, kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - j. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat dilakukan dengan skema bisnis.

- k. Pembangunan mekanisme kerja virtual bagi birokrasi daerah agar lebih agile dengan tetap menjaga aspek good governance.
- l. Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara menyeluruh dengan basis real time sehingga mendukung perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.
- m. Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
- n. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan reward and punishment.

4. *Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Resiko yang terkendali.*

- a. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Pemerintah yang efektif, efisien dan Akuntabel
- b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.
- c. Pengelolaan Pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.

5. *Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien.*

- a. Organisasi dan SDM yang optimal
- b. Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi.
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, Visi Provinsi Jawa Tengah adalah **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Sedangkan misi Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai visi tersebut adalah :

- 1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno

yaitu berdaulat di Bidang Politik, berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.

2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan “*Mboten korupsi dan Mboten Ngapusi*”
4. Memperkuat Kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2022 diarahkan kepada “**Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung Penguatan Daya Saing SDM**”. Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah tersebut dijabarkan pada arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dengan prioritas sebagai berikut :

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
2. Penguatan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.
3. Percepatan pemulihan dan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia menuju SDM berdaya saing.
4. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Kodusivitas Wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Instansi yang terkait dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tingkat Provinsi Jawa Tengah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Jawa Tengah terkait dengan pelaksanaan misi yang ketiga yaitu :
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan “ *Mboten korupsi dan Mboten Ngapusi*”

Tujuan :

1. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik
2. Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah.
3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran :

1. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai kaidah perundangan.
2. Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Strategi :

1. Implementasi kebijakan dan pentahapan pembayaran non tunai.
2. Implementasi kebijakan dan pentahapan paperless.
3. Melakukan validasi data terkait aset di pengguna yang masih layak digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi yang akan dimanfaatkan dengan mempertimbangkan kondisi dan status aset melalui BMD.
4. Aset-aset yang saat ini dalam masa pemanfaatan oleh pihak ketiga akan dilakukan penilaian ulang untuk kewajaran harga sewa (untuk menunjang kenaikan harga sewa).

Arah Kebijakan :

1. Penyesuaian kebijakan dan percepatan penggunaan aplikasi penatausahaan keuangan serta meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan/pembayaran.
2. Persiapan kebijakan dan system pencairan dalam aplikasi penatausahaan dengan mekanisme paperless.
3. Inventarisasi dan validasi aset serta percepatan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan aset.
4. Implementasi kebijakan dan pentahapan pembayaran non tunai.
5. Implementasi kebijakan dan pentahapan mekanisme

paperless.

6. Implementasi kebijakan pengamanan aset secara fisik dan administrasi serta tertib administrasi penatausahaan dan digitalisasi promosi pemanfaatan aset daerah.
7. Perluasan dan pengendalian pembayaran belanja non tunai, baik pengeluaran maupun penerimaan.
8. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dengan Mekanisme Paperless secara bertahap.
9. Perluasan cakupan penatausahaan aset, peningkatan volume aset yang diamankan secara fisik dan administrative dan kenaikan jumlah aset yang idle yang disewakan/dikerjasamakan.
10. Integrasi dan perluasan pembayaran belanja non tunai dan penggunaan aplikasi secara menyeluruh.
11. Pengembangan penatausahaan keuangan dengan mekanisme paperless.
12. Integrasi sistem tata usaha aset dan pemanfaatan, upaya mengurangi persentase aset yang belum diamankan secara fisik dan administrative serta alternative pemanfaatan untuk dukungan PAD.
13. Penerapan penggunaan non tunai sesuai optimal.
14. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dengan mekanisme paperless sepenuhnya.
15. Ketepatan jumlah dan nilai barang melalui sensus BMD guna optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan aset daerah.
16. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian dan keuangan perangkat daerah.
17. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah.
18. Mengoptimalkan capaian fisik kegiatan dan capaian indikator Renstra.

3.1.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

Arah kebijakan pembangunan tahunan dirumuskan secara adaptif dan responsive terhadap perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Terjadinya wabah covid - 19 yang dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, memberi dampak sangat signifikan kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini disikapi dengan penyesuaian perumusan kebijakan pembangunan pada Tahun 2022. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pembangunan di Kabupaten Pemalang pun disesuaikan menjadi **“Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas”**.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2022 juga dirumuskan dengan mempertimbangkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih pada plikada serentak tanggal 9 Desember 2020. Visinya yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang Adil, Makmur, Agamis Dan Ngangen”**.

Adapun dalam rangka pencapaian Visi kabupaten Pemalang tersebut, akan dijabarkan dalam 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Pemalang diantaranya yaitu :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan tata kelola pemerintahan untuk mendukung salah satu prioritas

pembangunan Kabupaten Pemalang berupa mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Berdasarkan misi tersebut, Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang diupayakan untuk mendukung peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia;
- b. Meningkatkan pelayanan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Meningkatkan disiplin dan kinerja ASN di BPKAD;
- d. Mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan aset daerah dan pendapatan jasa giro/bunga deposito;
- e. Meningkatkan Akurasi Pengelolaan Aset Daerah yaitu penyajian data pada Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan data aset yang dikuasai dan Neraca Daerah.
- f. Meningkatkan pengamanan aset khususnya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan cara memfasilitasi proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- g. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Ekuitas (LE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kabupaten Pemalang, agar dapat dipertahankan hasil opini BPK RI “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” yang telah diraih 5 (lima) tahun berturut-turut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

3.2.1. Tujuan BPKAD

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 telah ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya yaitu **“Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah”**. Dalam mencapai tujuan tersebut memiliki 2 indikator yaitu :

- Hasil Pengukuran indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan target 80 dan;
- Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dengan target 93 %.

Tujuan BPKAD tersebut menjadi pedoman dalam menyusun Renja agar semua program dan kegiatan yang tercantum pada Renja BPKAD searah dengan tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Memperkuat eksistensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai lembaga yang berkualitas, berkompeten dan meningkatkan kapabilitas dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
2. Meningkatkan disiplin dan mengembangkan kemampuan ASN BPKAD dalam memberikan pelayanan yang prima;
3. Memberikan pedoman dan koridor bagi unsur pelaksana program dan kegiatan dalam menjalankan program dan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mendukung program yang tercantum pada RPJMD.

3.2.2. Sasaran BPKAD

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran yang ingin dicapai oleh BPKAD terdapat 2 Sasaran yaitu:

Sasaran 1 : ”Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”, dengan indikator sasarnya yaitu diantaranya :

- Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran dengan target bobot nilai 15;
- Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran dengan target bobot nilai 20;
- Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah dengan target bobot nilai 15;
- Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki dengan target 50 %.

Sasaran 2 : “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”,dengan indikator sasarnya yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 84,08.

Sasaran BPKAD menjadi titik fokus penyusunan program dan kegiatan BPKAD yang tercantum dalam Renja, agar semua program dan kegiatan dapat mendukung tercapainya sasaran BPKAD tersebut.

Ada pun sasaran Renja BPKAD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya *human performance* (kemampuan dan kemauan aparatur) dalam meningkatkan produktifitas kinerja;
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan target capaian Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ”

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategik, karena didalamnya terkandung rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana kerja khususnya sasaran tahunan

dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana sumber daya aparatur harus mengelolanya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun anggaran.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Tahun 2022 merupakan kegiatan regular yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang sudah disesuaikan dengan Peremendagri Nomor 90 tahun 2020, dimana terdiri dari 3 Program dengan 14 Kegiatan dan 83 Sub Kegiatan. Dari 3 Program yang ada 1 program merupakan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan 8 Kegiatan, dan 2 Program lainnya adalah program pokok BPKAD yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 5 Kegiatan dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 Kegiatan.

Tabel. 3.1

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode Program/ Kegiatan		Usuran/Bidang Usuran/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Rencana Maju Rencana Tahun 2023				
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
5	02	Keuangan					523.694.489.501			554.407.400.000			
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Indeks Reformasi Birokrasi di BPKAD	BPKAD	53	9.876.249.100	53	14.860.260.000		
						Nilai SAKIP di BPKAD		60,01		60,01			
5	02	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	BPKAD	12 Dokumen	24.000.000		12 Dokumen	31.200.000	
5	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah	BPKAD	3 Dokumen	4.000.000		3 Dokumen	4.800.000
5	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	BPKAD	70 Dokumen	1.000.000		70 Dokumen	1.200.000
5	02	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	BPKAD	100 Dokumen	2.000.000		100 Dokumen	2.400.000
5	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	BPKAD	70 Dokumen	6.000.000		70 Dokumen	7.200.000
5	02	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	BPKAD	100 Dokumen	8.000.000		100 Dokumen	9.600.000

5	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah LKjIP Perangkat Daerah - Jumlah Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan - Jumlah Laporan Realisasi Kinerja triwulanan - Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang tersusun	BPKAD	21 Laporan	3.000.000			21 Laporan	3.600.000
5	02	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulanan (Level Eselon 2,3 dan 4) - Jumlah Laporan Evaluasi Realisasi RKPD	BPKAD	60 Laporan	-			60 Laporan	2.400.000
5	02	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	7 jenis	6.799.850.000			7 jenis	8.415.420.000
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan (Gaji = 3.582.442.000, Tunjangan = 3.181.409.000)	BPKAD	48 orang	6.763.850.000			48 orang	8.116.620.000
5	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/Bendahara - Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS	BPKAD	25 SK	30.000.000			25 SK	40.000.000
5	02	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	- Jumlah Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala BPKAD terkait Pengeluaran Keuangan - Jumlah Berkas yang diverifikasi (20 SK, 44 Berkas)	BPKAD	64 Dokumen	-			64 Dokumen	195.000.000
5	02	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun, LPPD dan LKPJ Perangkat Daerah	BPKAD	3 Laporan	3.000.000			3 Laporan	5.000.000
5	02	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen dan laporan sebagai bahan tanggapan pemeriksaan perangkat daerah	BPKAD	10 Dokumen	3.000.000			10 Dokumen	3.000.000
5	02	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran BPKAD yang tersusun	BPKAD	39 laporan	-			39 laporan	3.600.000
5	02	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analissi Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Perangkat Daerah	BPKAD	1 Laporan	-			1 laporan	3.600.000

5	02	01	2	03	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Administrasi Penatausahaan BMD	BPKAD	1 Dokumen	-			1 Dokumen	6.000.000
5	02	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	- Jumlah Laporan Bulanan BMD ,Triwulanan, Semesteran dan Laporan Rekonsiliasi BMD SKPD	BPKAD	17 laporan	-			17 laporan	6.000.000
5	02	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	BPKAD	1 Jenis	87.128.000			1 Jenis	240.000.000
5	02	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah ASN yang mengikuti Bintek/Seminar/ Workshop/Diklat	BPKAD	60 Orang	87.128.000			60 orang	240.000.000
5	02	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	BPKAD	10 Jenis	348.100.000			10 Jenis	528.600.000
5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Perbaikan Instalasi Listrik dan Pembelian Alat Penerangan yang terlaksana selama setahun	BPKAD	12 kegiatan	5.000.000			12 kegiatan	9.000.000
5	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana selama setahun	BPKAD	5 unit	-			5 unit	12.000.000
5	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli	BPKAD	10 Jenis	-			10 Jenis	6.000.000
5	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor, Makanan dan Minuman harian/kegiatan yang tersedia	BPKAD	32 Jenis	35.000.000			32 Jenis	72.902.000
5	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia selama setahun	BPKAD	11 Jenis	25.000.000			11 Jenis	60.000.000
5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terlaksana selama setahun	BPKAD	12 kegiatan	10.000.000			12 kegiatan	18.000.000
5	02	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pembelian Bendera dan umbul umbul	BPKAD	50 buah	3.000.000			50 buah	6.000.000
5	02	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah jenis Penyediaan Makanan dan Minuman rapat dan Makan Minum Tamu yang terlaksana selama setahun	BPKAD	2 Jenis	60.000.000			2 Jenis	95.098.000

5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah yang terlaksana dalam rangka koordinasi dan konsultasi selama setahun	BPKAD	50 kegiatan	200.000.000			50 kegiatan	240.000.000
5	02	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah Jasa Penataan Arsip	BPKAD	8 Orang	8.000.000			8 Orang	9.600.000
5	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan	BPKAD	6 jenis	1.525.000.000			6 jenis	4.248.000.000
5	02	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Pengadaan Mobil untuk Operasional pejabat pada Perangkat Daerah	BPKAD	6 unit	1.015.000.000			6 unit	2.888.676.000
5	02	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	BPKAD	3 Unit	510.000.000			3 Unit	1.131.324.000
5	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	- Jumlah Pengadaan Meubeleu selama setahun	BPKAD	3 unit	-			3 unit	12.000.000
5	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	BPKAD	9 Unit	10.000.000			9 Unit	180.000.000
5	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor selama setahun	BPKAD	3 unit	-			3 unit	30.000.000
5	02	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang terlaksana selama setahun	BPKAD	10 buah	-			10 buah	6.000.000
5	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa yang menunjang operasional Perangkat Daerah	BPKAD	4 Jenis	883.582.000			4 Jenis	1.045.800.000
5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	- Jumlah surat masuk, surat keluar, nota dinas dan dokumen surat menyurat lainnya yang tercatat dan terdistribusi secara tertib selama setahun	BPKAD	7.800 surat/ Notdin	12.960.000			7.800 surat/ Notdin	21.600.000

5	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah kebutuhan Air, Telephone, Listrik, Internet dan Cloud selama setahun	BPKAD	4 Jenis	660.000.000			4 Jenis	792.000.000
5	02	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama setahun	BPKAD	30 Unit	10.000.000			30 Unit	30.00.000
5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (K3 dan alat alat kebersihan) yang tersedia selama setahun	BPKAD	4 Orang	200.622.000			4 Orang	202.200.000
5	02	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	BPKAD	7 Jenis	198.589.100			7 Jenis	345.600.000
5	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-					-	-
5	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	- - Jumlah STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 perorangan dan jabatan milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya Jumlah STNK Kendaraan Operasional Dinas Roda milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya Jumlah Mobil Operasional dan Mobil Jabatan yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	BPKAD	53 Unit	144..000.000			53 Unit	153.600.000
5	02	01	2	09	05	Pemeliharaan Meubeleur	- Jumlah Meubeleur yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	BPKAD	5 unit	842.100			5 unit	6.000.000
5	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	BPKAD	30 unit	8.320.000			30 unit	30.000.000

5	02	02	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	BPKAD	1 Dokumen	125.819.500			1 Dokumen	240.000.000
5	02	02	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS	BPKAD	1 Dokumen	22.180.500			1 Dokumen	60.000.000
5	02	02	2	01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang diverifikasi	BPKAD	5000 Dokumen	15.000.401,20			5000 Dokumen	30.000.000
5	02	02	2	01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	BPKAD	5000 Dokumen	15.000.000			5000 Dokumen	30.000.000
5	02	02	2	01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi	BPKAD	5000 Dokumen	30.000.000			5000 Dokumen	120.000.000
5	02	02	2	01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	BPKAD	5000 Dokumen	30.000.000			5000 Dokumen	120.000.000
5	02	02	2	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun	BPKAD	2 Dokumen	200.000.000			2 Dokumen	522.000.000
5	02	02	2	01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	BPKAD	5 Dokumen	165.000.000			5 Dokumen	552.000.000
5	02	02	2	01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Laporan Data Kapasitas Anggaran Pendapatan (Penetapan dan Perubahan)	BPKAD	2 Laporan	-			2 Laporan	36.000.000

5	02	02	2	01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Data Kapasitas Anggaran Belanja Daerah (Penetapan dan Perubahan)	BPKAD	2 Laporan	-			2 Laporan	36.000.000
5	02	02	2	01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Laporan Data Kapasitas Anggaran Pembiayaan (Penetapan dan Perubahan)	BPKAD	2 Laporan	-			2 Laporan	36.000.000
5	02	02	2	01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah	BPKAD	120 orang	-			120 orang	180.000.000
5	02	02	2	02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya fungsi perbendaharaan Daerah	BPKAD	12 Jenis	342.500.000			12 Jenis	846.000.000
5	02	02	2	02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah - Jumlah Laporan Mutasi Deposito - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Jasa Giro dan Bunga Deposito	BPKAD	48 Laporan	111.962.500			48 Laporan	187.879.000
5	02	02	2	02	03	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan anggaran Kas dan SPD	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas perangkat daerah yang diterbitkan selama setahun (150 SPD, 150 Anggaran Kas)	BPKAD	300 Dokumen	-			300 Dokumen	36.000.000
5	02	02	2	02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Jumlah Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) yang disusun - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi yang disusun - Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dana TPG - Jumlah Laporan Realisasi DAK Fisik (12 LKT, 4 BA Rekon Bagi Hasil Pajak Prop, 4 Laporan Rekon TPG, 12 Laporan Realisasi DAK Fisik)	BPKAD	32 Laporan	-			32 Laporan	54.000.000
5	02	02	2	02	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan	- Jumlah Laporan Posisi Kas - Jumlah SP2D yang diterbitkan - Jumlah Dokumen SKPP yang diterbitkan	BPKAD	5740 Dokumen	133.537.500			5740 Dokumen	353.500.000

5	02	02	2	03	07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TP/TGR	Jumlah Laporan Penyelesaian TP/TGR	BPKAD	2 Laporan	-			2 Laporan	30.000.000
5	02	02	2	03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	Jumlah Perbup Kebijakan Akuntansi Pemda yang tersusun selama setahun	BPKAD	1 Dokumen	-			1 Perbup	42.000.000
5	02	02	2	03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda	- Jumlah Manual Book dan Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi	BPKAD	2 Dokumen	-			2 Dokumen	60.000.000
5	02	02	2	04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Tersalurkannya Bantuan Keuangan, Bantuan Korban Bencana dan Bagi Hasil kepada Masyarakat	BPKAD	90%	511.823.140.000			90%	524.923.140.000
5	02	02	2	04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang menerima Bantuan Keuangan	BPKAD	211 Desa	487.971.067.000			211 Desa	494.571.067.000
5	02	02	2	04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Proses Penyaluran Belanja Tidak Terduga	BPKAD	50 Dokumen	13.500.000.000			50 Dokumen	20.000.000.000
5	02	02	2	04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang menerima Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	BPKAD	211 Desa	10.352.073.000			211 Desa	10.352.073.000
5	02	02	2	05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Tersedianya Sistem Informasi yang mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	2 Kegiatan	84.500.000			2 Kegiatan	276.000.000
5	02	02	2	05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dibuat dan dipelihara	BPKAD	2 Dokumen	29.500.000			2 Dokumen	96.000.000
5	02	02	2	05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang mengikuti Bimtek operasional sistem penyusunan Laporan Keuangan (SIMDA)	BPKAD	75 Orang	55.000.000			75 Orang	180.000.000
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BMD			Presentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	100%	730.600.000				100%	11.364.000.000
5	02	03	2	01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	BPKAD	8 dokumen	730.600.000			8 dokumen	11.364.000.000
5	02	03	2	01	03	Penyusunan perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPMBMD yang tersusun selama setahun	BPKAD	2 dokumen	15.000.000			2 dokumen	36.000.000

5	02	03	2	01	05	Penatausahaan BMD	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pengguna BMD dan Pengurus BMD	BPKAD	4 Dokumen	-			4 Dokumen	18.000.000
5	02	03	2	01	07	Pengamanan BMD	- Jumlah Tanah Milik Pemda yang terproses sertifikatnya - Jumlah Tanah Pemda yang terpasangi Papan Identitas Tanah Pemda (200 sertifikat, 100 papan)	BPKAD	300 Bidang	446.500.000			300 Bidang	852.000.000
5	02	03	2	01	08	Penilaian BMD	Jumlah Aset yang dinilai	BPKAD	10 unit	-			10 unit	60.000.000
5	02	03	2	01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian	BPKAD	2 Laporan	13.500.000			2 Laporan	30.000.000
5	02	03	2	01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	- Jumlah alat berat dan kendaraan dinas roda empat yang dijaminakan selama setahun - Jumlah Laporan Pemindahtanganan dan Penghapusan - Jumlah Laporan Monitoring Pemanfaatan BMD - Jumlah SPT PBB tanah milik Pemkab yang terbayar - Jumlah Pengadaan Tanah - Jumlah Aset yang telah dimanfaatkan	BPKAD	155 Unit, 4 Laporan, 75 SPT, 1 paket, 51 lokasi	200.000.000			155 Unit, 4 Laporan, 75 SPT, 1 paket, 51 lokasi	10.200.000.000
5	02	03	2	01	12	Penyusunan Laporan BMD	- Jumlah Laporan BMD Akhir Tahun Konsolidasi - Jumlah Laporan Semesteran BMD Konsolidasi - Jumlah Laporan Bulan dan Triwulanan BMD Konsolidasi	BPKAD	14 Laporan	20.600.000			14 Laporan	48.000.000
5	02	03	2	01	13	Pembinaan Pengelolaan BMD	- Jumlah personil yang mengikuti Sosialisasi/Bimtek pengelola BMD	BPKAD	75 Orang	35.000.000			75 Orang	120.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan BPKAD

Adapun rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang terdiri dari 3 program, 14 kegiatan dan 83 sub kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota yang terdiri dari :
 - Kegiatan : 8
 - Sub Kegiatan : 44
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - Kegiatan : 8
 - Sub Kegiatan : 31
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :
 - Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan : 8

sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan BPKAD Kabupaten Pematang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah			Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	80	523.694.489.501	80	554.407.400.000	BPKAD
			Persentase Pemanfaatan BMD	93%	93%		BPKAD		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.08	84.08		BPKAD		
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	15	15		BPKAD		
			Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	20	20		BPKAD		
			Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	15	15		BPKAD		
			Persentase Barang Milik Daerah yang dimilikki	50 %	50 %		BPKAD		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Indeks Reformasi Birokrasi di BPKAD	53,10	9.876.249.100		14.860.620.000	BPKAD
				2. Nilai SAKIP di BPKAD	60,30				BPKAD
			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	24.000.000	12	31.200.000	BPKAD
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.000.000	3 Dokumen	4.800.000	BPKAD
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	70 Dokumen	1.000.000	70 Dokumen	1.200.000	BPKAD
3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	100 Dokumen	2.000.000	100 Dokumen	2.400.000	BPKAD
4			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	70 Dokumen	6.000.000	70 Dokumen	7.200.000	BPKAD
5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	100 Dokumen	8.000.000	100 Dokumen	9.600.000	BPKAD
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan	- Jumlah LKjIP Perangkat Daerah	21 Laporan	3.000.000	21 Laporan	3.600.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan - Jumlah Laporan Realisasi Kinerja triwulanan - Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang tersusun					
7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulanan (Level Eselon 2,3 dan 4) - Jumlah Laporan Evaluasi Realisasi RKPD	60 Laporan	-	60 Laporan	2.400.000	BPKAD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 Jenis	6.799.850.000	7 Jenis	8.415.420.000	BPKAD
8			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan (Gaji = 3.582.442.000, Tunjangan = 3.181.409.000)	48 orang	6.763.850.000	48 orang	8.116.620.000	BPKAD
9			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/Bendahara - Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS	25 SK	30.000.000	25 SK	40.000.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	- Jumlah Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala BPKAD terkait Pengeluaran Keuangan - Jumlah Berkas yang diverifikasi (20 SK, 44 Berkas)	64 Dokumen	-	64 Dokumen	195.000.000	BPKAD
11			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun, LPPD dan LKPJ Perangkat Daerah	3 Laporan	3.000.000	3 Laporan	5.000.000	BPKAD
12			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen dan laporan sebagai bahan tanggapan pemeriksaan perangkat daerah	10 Dokumen	3.000.000	10 Dokumen	3.000.000	BPKAD
13			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran BPKAD yang tersusun	39 laporan	-	39 laporan	3.600.000	BPKAD
14			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Perangkat Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	3.600.000	BPKAD
			Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Penatausahaan BMD	1 jenis	-	1 Jenis	6.000.000	BPKAD
15			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	- Jumlah Laporan Bulanan BMD ,Triwulanan, Semesteran	17 laporan	-	17 laporan	6.000.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			BMD pada SKPD	dan Laporan Rekonsiliasi BMD SKPD					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	1 jenis	87.128.000	1 jenis	240.000.000	BPKAD
16			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah ASN yang mengikuti Bintek/Seminar/Workshop/Diklat	60 Orang	87.128.000	60 Orang	240.000.000	BPKAD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	10 Jenis	348.100.000	10 Jenis	528.600.000	BPKAD
17			Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Perbaikan Instalasi Listrik dan Pembelian Alat Penerangan yang terlaksana selama setahun	12 kegiatan	5.000.000	12 kegiatan	9.000.000	BPKAD
18			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana selama setahun	5 unit	-	5 unit	12.000.000	BPKAD
19			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli	10 Jenis	-	10 Jenis	6.000.000	BPKAD
20			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor, Makanan dan Minuman harian/kegiatan yang tersedia	32 Jenis	35.000.000	32 Jenis	72.902.000	BPKAD
21			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia selama setahun	11 Jenis	25.000.000	11 Jenis	60.000.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terlaksana selama setahun	12 kegiatan	10.000.000	12 kegiatan	18.000.000	BPKAD
23			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pembelian Bendera dan umbul umbul	50 buah	3.000.000	50 buah	6.000.000	BPKAD
24			Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah jenis Penyediaan Makanan dan Minuman rapat dan Makan Minum Tamu yang terlaksana selama setahun	2 Jenis	60.000.000	2 Jenis	95.098.000	BPKAD
25			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah yang terlaksana dalam rangka koordinasi dan konsultasi selama setahun	50 kegiatan	200.000.000	50 kegiatan	240.000.000	BPKAD
26			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah Jasa Penataan Arsip	8 Orang	8.000.000	8 Orang	9.600.000	BPKAD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan	6 Jenis	1.525.000.000	6 Jenis	4.248.000.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Pengadaan Mobil untuk Operasional pejabat pada Perangkat Daerah	6 unit	1.015.000.000	6 unit	2.888.676.000	BPKAD
28			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	3 Unit	510.000.000	3 unit	1.131.324.000	BPKAD
29			Pengadaan Mebel	- Jumlah Pengadaan Meubeleur selama setahun	3 unit	-	3 unit	12.000.000	BPKAD
30			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	9 Unit	10.000.000	9 Unit	180.000.000	BPKAD
31			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor selama setahun	3 unit	-	3 unit	30.000.000	BPKAD
32			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang terlaksana selama setahun	10 buah	-	10 buah	6.000.000	BPKAD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa yang menunjang operasional Perangkat Daerah	4 Jenis	883.582.000	4 Jenis	1.045.800.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33			Penyediaan Jasa surat Menyurat	- Jumlah surat masuk, surat keluar, nota dinas dan dokumen surat menyurat lainnya yang tercatat dan terdistribusi secara tertib selama setahun	7.800 surat/ Notdin	12.960.000	7.800 surat/ Notdin	21.600.000	BPKAD
34			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah kebutuhan Air, Telephone, Listrik, Internet dan Cloud selama setahun	4 Jenis	660.000.000	4 Jenis	792.000.000	BPKAD
35			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama setahun	30 Unit	10.000.000	30 Unit	30.000.000	BPKAD
36			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (K3 dan alat alat kebersihan) yang tersedia selama setahun	4 Orang	200.622.000	4 Orang	202.200.000	BPKAD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	7 Jenis	198.589.100	7 Jenis	345.600.000	BPKAD
37			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	- Jumlah STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 perorangan dan jabatan milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya - Jumlah STNK Kendaraan Operasional Dinas Roda milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya -Jumlah Mobil Operasional dan Mobil Jabatan yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	53 Unit	144.000.000	53 Unit	153.600.000	BPKAD
39			Pemeliharaan Meubeleu	- Jumlah Meubeleu yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	5 unit	842.100	5 unit	6.000.000	BPKAD
40			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	30 unit	8.320.000	30 unit	30.000.000	BPKAD
41			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	BPKAD
42			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	2 lokal	15.000.000	2 lokal	120.000.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	15 unit	29.870.000	15 unit	30.000.000	BPKAD
44			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan perlengkapan gedung kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	12 kegiatan	557.000	12 kegiatan	6.000.000	BPKAD
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai Ketentuan	100 %	513.087.640.401,20	100 %	528.183.140.000	BPKAD
		Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum		60 %	60 %		BPKAD		
		Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan		100 %	100 %		BPKAD		
		Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Ketentuan		100 %	100 %		BPKAD		
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan		100 %	100 %		BPKAD		
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat	15 jenis	603.000.401,20	15 jenis	1.932.000.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daerah					
45			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	1 Dokumen	125.819.500	1 Dokumen	240.000.000	BPKAD
46			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS	1 Dokumen	22.180.500	1 Dokumen	60.000.000	BPKAD
47			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang diverifikasi	5000 Dokumen	15.000.401,20	5000 Dokumen	30.000.000	BPKAD
48			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	5000 Dokumen	15.000.000	5000 Dokumen	30.000.000	BPKAD
49			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi	5000 Dokumen	30.000.000	5000 Dokumen	120.000.000	BPKAD
50			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	5000 Dokumen	30.000.000	5000 Dokumen	120.000.000	BPKAD
51			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	522.000.000	BPKAD
52			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	Jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	5 Dokumen	165.000.000	5 Dokumen	552.000.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi	
					Tahun 2022		Tahun 2023			
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							
53			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Laporan Data Kapasitas Anggaran Pendapatan (Penetapan dan Perubahan)	2 Laporan	-	2 Lpaoran	36.000.000	BPKAD	
54			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Data Kapasitas Anggaran Belanja Daerah (Penetapan dan Perubahan)	2 Laporan	-	2 Laporan	36.000.000	BPKAD	
55			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Laporan Data Kapasitas Anggaran Pembiayaan (Penetapan dan Perubahan)	2 Laporan	-	2 Laporan	36.000.000	BPKAD	
56			Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah	120 orang	-	120 orang	180.000.000	BPKAD	
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya fungsi perbendaharaan Daerah	12 jenis	342.500.000	12 jenis	846.000.000	BPKAD	
57			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah - Jumlah Laporan Mutasi Deposito - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Jasa Giro dan Bunga Deposito	48 Laporan	111.962.500	48 Laporan	187.879.000	BPKAD	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58			Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan anggaran Kas dan SPD	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas perangkat daerah yang diterbitkan selama setahun (150 SPD, 150 Anggaran Kas	300 Dokumen	-	3000 Dokumen	36.000.000	BPKAD
59			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Jumlah Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) yang disusun - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi yang disusun - Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dana TPG - Jumlah Laporan Realisasi DAK Fisik (12 LKT, 4 BA Rekon Bagi Hasil Pajak Prop, 4 Laporan Rekon TPG, 12 Laporan Realisasi DAK Fisik)	32 Laporan	-	32 Laporan	54.000.000	BPKAD
60			Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan	- Jumlah Laporan Posisi Kas - Jumlah SP2D yang diterbitkan - Jumlah Dokumen SKPP yang diterbitkan (240 Lap Poskas, 5.000 SP2D, 500 SKPP)	5740 Dokumen	123.537.500	5740 Dokumen	353.500.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						
61			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	- Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PPKD - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran BPKAD - Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	72 Laporan	-	72 laporan	18.000.000	BPKAD
62			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD yang tersusun selama setahun	1 Perbup	55.000.000	1 Perbup	108.000.000	BPKAD
63			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah personil pengelola keuangan pada perangkat daerah yang mengikuti Pembinaan/Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah	75 orang	52.000.000	75 orang	88.620.000	BPKAD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	11 jenis	234.500.000	11 jenis	858.000.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD dan PPKD	48 Laporan	15.000.000	14 Laporan	42.000.000	BPKAD
65			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Konsolidasi, Laporan Keuangan Bulanan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Triwulanan Konsolidasi yang tersusun selama setahun	14 Laporan	19.000.000	1 Dokumen	78.000.000	BPKAD
66			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan Pemda Akhir Tahun yang tersusun	1 Dokumen	34.500.000	1 Dokumen	78.000.000	BPKAD
67			Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun selama setahun	2 Dokumen	166.000.000	2 Dokumen	570.000.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TP/TGR	Jumlah Laporan Penyelesaian TP/TGR	2 Laporan	-	2 Laporan	30.000.000	BPKAD
69			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	Jumlah Perbup Kebijakan Akuntansi Pemda yang tersusun selama setahun	1 Perbup	-	1 Perbup	42.000.000	BPKAD
70			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda	- Jumlah Manual Book dan Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi	2 Dokumen	-	2 Dokumen	60.000.000	BPKAD
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersalurkannya Bantuan Keuangan, Bantuan Korban Bencana dan Bagi Hasil kepada Masyarakat	90%	511.823.140.000	90 %	524.923.140.000	BPKAD
71			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang menerima Bantuan Keuangan	211 Desa	487.971.067.000	211 Desa	494.571.067.000	BPKAD
72			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Proses Penyaluran Belanja Tidak Terduga	50 Dokumen	13.500.000.000	50 Dokumen	20.000.000.000	BPKAD
73			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang menerima Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	211 Desa	10.352.073.000	211 Desa	10.352.000.000	BPKAD
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	Tersedianya Sistem Informasi yang mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah	2 kegiatan	84.500.000	2 kegiatan	276.000.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Daerah Lingkup Keuangan Daerah						
74			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dibuat dan dipelihara	2 Dokumen	29.500.000	2 Dokumen	96.000.000	BPKAD
75			Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang mengikuti Bimtek operasional sistem penyusunan Laporan Keuangan (SIMDA)	75 Orang	55.000.000	75 Orang	180.000.000	BPKAD
			PROGRAM PENGELOLAAN BMD	Presentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	730.600.000	100 %	11.364.000.000	BPKAD
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	8 dokumen	730.600.000	8 dokumen	11.364.000.000	BPKAD
76			Penyusunan perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD yang tersusun selama setahun	2 dokumen	15.000000	2 dokumen	36.000.000	BPKAD
77			Penatausahaan BMD	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pengguna BMD dan Pengurus BMD	4 Dokumen	-	4 Dokumen	18.000.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78			Pengamanan BMD	- Jumlah Tanah Milik Pemda yang terproses sertifikatnya - Jumlah Tanah Pemda yang terpasangi Papan Identitas Tanah Pemda (200 sertifikat, 100 papan)	300 Bidang	446.500.000	300 Bidang	852.000.000	BPKAD
79			Penilaian BMD	Jumlah Aset yang dinilai	10 unit	-	10 unit	60.000.000	BPKAD
80			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian	2 Laporan	13.500.000	2 Laporan	30.000.000	BPKAD
81			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	- Jumlah alat berat dan kendaraan dinas roda empat yang dijaminakan selama setahun - Jumlah Laporan Pemindahtanganan dan Penghapusan - Jumlah Laporan Monitoring Pemanfaatan BMD - Jumlah SPT PBB tanah milik Pemkab yang terbayar - Jumlah Pengadaan Tanah - Jumlah Aset yang telah dimanfaatkan	155 Unit, 4 Laporan, 75 SPT, 1 paket, 51 lokasi	200.000.000	155 Unit, 4 Laporan, 75 SPT, 1 paket, 51 lokasi	10.200.000.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82			Penyusunan Laporan BMD	- Jumlah Laporan BMD Akhir Tahun Konsolidasi - Jumlah Laporan Semesteran BMD Konsolidasi - Jumlah Laporan Bulan dan Triwulanan BMD Konsolidasi	14 Laporan	20.600.000	14 Laporan	48.000.000	BPKAD
83			Pembinaan Pengelolaan BMD	- Jumlah personil yang mengikuti Sosialisasi/Bimtek pengelola BMD	75 Orang	35.000.000	75 Orang	120.000.000	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 ini merupakan pedoman bagi BPKAD dalam melaksanakan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. Program Kegiatan disinkronkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD serta misi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2021 -2026 serta mempedomani regulasi pengelolaan keuangan daerah terbaru yaitu Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai dasar dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Tahun 2022 juga memiliki fungsi evaluative terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021. Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat penyesuaian kegiatan agar sinkron dengan program sehingga kegiatan pendukung program yang tercantum pada RPJMD yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berada pada satu kelompok program. Selain itu mapping program dan kegiatan disesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 merupakan langkah-langkah lanjutan terhadap Renja sebelumnya dengan harapan dapat tercapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra serta sejalan dengan RKPD yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pemalang 2021-2026.

Pemalang, 5 Juli 2021
KEPALA BPKAD
KABUPATEN PEMALANG



Drs. M.A. PUNTODEWO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640327 199201 1 002